

Lampiran : Surat Edaran Menteri PU Nomor : 13/SE/M/2013
Tentang : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
di Kementerian Pekerjaan Umum
Tanggal : 23 Juli 2013

PANDUAN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya penerapan keadilan atas hak azasi manusia tanpa mengkotak-kotakkan gender, usia, kebutuhan khusus, dan lain-lain. Hal tersebut telah menjadi amanah bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang responsif gender, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman, yang ditujukan untuk membangun infrastruktur secara efisien, efektif, dan produktif, memiliki karakteristik yang cenderung netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran penerima manfaatnya. Namun dalam serangkaian input, proses, dan outputnya seringkali terdapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender.

Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan gender serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui penyusunan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan gender, melalui suatu mekanisme perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diarahkan oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2009 dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, untuk tahun anggaran berjalan.

Perkembangan kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan implementasi pelaksanaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan gender, serta contoh penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang lebih baik, merupakan alasan Kementerian PU untuk melakukan review terhadap Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran di Kementerian PU yang disusun tahun 2009.

Kami berharap Panduan ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para penanggung jawab program dan kegiatan serta para perencana di Bidang P.U. dalam melakukan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada semua kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur P.U. dan Permukiman, agar di masa yang akan datang dapat ditingkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada Tim PUG PU, yang terdiri dari Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok-kelompok Kerja, dan Unit Sekretariat, sebagai tim penyusun, serta pihak-pihak terkait yang sudah berupaya dan bekerjasama secara optimal untuk mewujudkan tersusunnya buku panduan ini. Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait.

Jakarta, 23 Juli 2013

A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,



Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP
NIP. 110023320

TIM PENYUSUN

I. Pengarah

1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP
2. Ir. Sri Apriatini Soekardi, MM.
3. Dr. Ir. Ruchyat Deni Djakapermana, M.Eng.
4. Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc.
5. Ir. Rido Matari Ichwan, MCP.
6. Ir. Sumito

II. Kontributor

1. Ir. Budiprastiyo Doelrachman, MUP
2. Djuang Fadjar Sodikin, ST., MT., M.Sc.
3. Dian Rosnawati, ST., MT.
4. Ir. Desrah, MT.
5. Ajiarti, S.Sos.
6. Elvia Nasrul, SS., MM.
7. Dento Mudhiarko, S.Sos.
8. Septiyati Ganjarsari, ST., MT.
9. Ir. Lilla Noerhayati Soedirman
10. Dra. Adi Sasutji, M.Eng.Sc.
11. Ir. Ineke Indrarini, M.Eng.Sc., MM.

III. Editor

1. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
2. Unit Sekretariat Tim Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pekerjaan Umum

IV. Perancang Tata Letak

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum

DAFTAR ISI

Hal	
i	KATA PENGANTAR
iii	TIM PENYUSUN
iv	DAFTAR ISI
v	DAFTAR ISTILAH
ix	DAFTAR TABEL
x	DAFTAR GAMBAR
xi	DAFTAR LAMPIRAN
1	Bab I Pendahuluan
1	1.1.Latar Belakang
3	1.2.Landasan Hukum
4	1.3.Tujuan
5	1.4.Sasaran
5	1.5.Ruang Lingkup
5	1.6.Sistematika Penulisan
6	Bab II Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik
6	2.1.Perencanaan dan Penganggaran Nasional
8	2.2.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
13	Bab III Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian PU
13	3.1.Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Kementerian PU
15	3.2.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian PU
39	Bab IV Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian PU
39	4.1.Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian PU
41	4.2.Pelaporan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian PU
	LAMPIRAN I: Contoh Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
	LAMPIRAN II: Contoh Matriks Trilateral Meeting
	LAMPIRAN III: Contoh GAP dan GBS

DAFTAR ISTILAH

No.	Istilah	Penjelasan
1.	Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. ¹
2.	Baseline Study	Analisis yang menggambarkan situasi suatu hal sebelum dilakukan intervensi apapun terhadap hal tersebut. Hasil analisis ini disebut data dasar/'baseline', yang dapat dibandingkan dengan situasi setelah hal tersebut mendapat intervensi atau mengalami perubahan. ²
3.	Beban Ganda	Peran publik yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki, dimana peran domestik (rumah tangga) dibebankan hanya kepada perempuan.
4.	Data Terpilah Gender	Data yang terpilah secara kuantitatif atau kualitatif mengenai hubungan/relasi dalam status, peran, dan kondisi, antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan. ³
5.	Gender	Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. ⁴
6.	Gender Budget Statement (GBS)	Dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan. Penyusunan dokumen GBS telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat antara lain <i>Gender analysis Pathway (GAP)</i> .

¹ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 56)

² disadur dari Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-based Management, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002 (halaman 18), <<http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf>>

³ disadur dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

⁴ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 55)

DAFTAR ISTILAH

No.	Istilah	Penjelasan
7.	Isu Gender	Permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan atau laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender. Di dalam struktur anggaran K/L, isu gender dapat terletak pada tingkat Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen. ⁵
8.	K/L	Kementerian/Lembaga
9.	Keadilan Gender	Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.). ⁶
10.	Kebijakan/Program Responsif Gender	Kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. ⁷
11.	Kesetaraan Gender	Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh, kesempatan serta hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaandalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. ⁶

⁵ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 28)

⁶ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 55)

⁷ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 56)

DAFTAR ISTILAH

No.	Istilah	Penjelasan
12.	Marginalisasi/peminggiran	Suatu proses penggeseran posisi atau status salah satu jenis kelamin menjadi lebih rendah bahkan terpinggirkan.
13.	Netral Gender	Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. ⁶
14.	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/ <i>difable</i> , serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. ⁸
15.	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. ⁹
16.	Perencanaan yang Responsif Gender	Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan. ⁸

⁸ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 55)

⁹ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 56)

DAFTAR ISTILAH

No.	Istilah	Penjelasan
17.	PHLN	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
18.	<i>Rapid Assessment</i>	Investigasi terhadap suatu situasi yang isu-nya belum dapat ditentukan dan tidak terdapat cukup waktu (atau sumber daya lain) untuk melakukan penelitian konvensional. ¹⁰
19.	<i>Stereotype</i>	Pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah atau sesat.
20.	Sub Ordinasi	Anggapan bahwa salah satu jenis kelamin lebih utama dibandingkan lainnya. Anggapan ini umumnya menyebabkan kedudukan dan peran salah satu jenis kelamin mempunyai posisi yang lebih rendah dan hal ini umumnya dimiliki oleh kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Posisi ini menyebabkan pembatasan ruang gerak perempuan di berbagai bidang kehidupan.
21.	T	Tahun anggaran berjalan
22.	T-1	Tahun anggaran 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan

¹⁰ disadur dari www.rapidassessment.net, diakses pada tanggal 19 Oktober 2012

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 3.1	Contoh Kegiatan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Bidang PU	19
Tabel 3.2	Contoh Analisis Isu Gender dengan Menggunakan Format GCL Terhadap Program/Kegiatan Yang Telah Memiliki Analisis Gender dan Rencana Aksi Untuk Ditindaklanjuti	21
Tabel 3.3	Format Matriks Trilateral Meeting Untuk Program/Kegiatan Yang Dianggarkan Responsif Gender (Contoh Pada Lampiran II)	22
Tabel 3.4	Contoh Analisis Dengan Metode GCL Pada Program/Kegiatan Yang Telah Memiliki Analisis Gender dan Rencana Aksi Yang Perlu Ditindaklanjuti	25
Tabel 3.5	Contoh GCL Untuk Identifikasi Isu Gender Pada Program/Kegiatan Terkait Aspek Pengaturan	26
Tabel 3.6	Langkah-Langkah Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP)	28
Tabel 3.7	Format Gender Analysis Pathway (GAP)	29
Tabel 3.8	Transformasi GAP ke Dalam GBS	31
Tabel 3.9	Petunjuk Pengisian KAK	37
Tabel 4.1	Dokumen dan Muatan Yang Diperbandingkan Pada Pemantauan Dalam Penyusunan	39

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	6
Gambar 2.2	Siklus Tahun Fiskal Kementerian/Lembaga Selama 1 (satu) Tahun	7
Gambar 2.3	Keterkaitan Antara Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender	10
Gambar 2.4	Mekanisme Penganggaran Berbasis Kinerja Yang Berperspektif Gender	11
Gambar 3.1	Proses Perencanaan dan Penganggaran di Kementerian PU	14
Gambar 3.2	Mekanisme Pengintegrasian Aspek Gender ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran di Kementerian PU	16
Gambar 3.3	Kerangka Penyusunan GAP	27
Gambar 3.4	Format GBS Dengan Sub Output	33
Gambar 3.5	Format GBS Tanpa Sub Output	34
Gambar 3.6	Format Kerangka Acuan Kerja/KAK Yang Berlaku Umum Sesuai PMK No. 94/PMK.02/2013	36
Gambar 4.1	Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan PPRG di Kementerian PU	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
	Lampiran I Contoh Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Tabel L.1	Target Kinerja Pembangunan Pengarusutamaan Gender Tahun Anggaran 2013 Dalam RKPTA 2013 45
	Lampiran II Contoh Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting
Tabel L.2	Contoh Matriks ARG Pada Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting Sekretariat Jenderal, Tahun Anggaran 2013 47
Tabel L.3	Contoh Matriks ARG Pada Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting Ditjen Sumber Daya Air, Tahun Anggaran 2013 48
Tabel L.4	Contoh Matriks ARG Pada Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting Ditjen Cipta Karya, Tahun Anggaran 2013 48
	Lampiran III Contoh Dokumen GAP dan GBS
Tabel L.5	Contoh GAP Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Jenderal, Tahun Anggaran 2012 49
	Contoh Format GBS Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Tahun Anggaran 2012 50
Tabel L.6	Contoh GAP Puslitbang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Tahun Anggaran 2012 54
	Contoh Format GBS Puslitbang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Tahun Anggaran 2012 55

		Hal
Tabel L.7	Contoh GAP Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi, Tahun Anggaran 2012	58
	Contoh Format GBS Badan Pembinaan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi, Tahun Anggaran 2012	59
Tabel L.8	Contoh GAP SNVT Pembangunan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara II, Ditjen Sumber Daya Air, Tahun Anggaran 2012	62
	Contoh Format GBS SNVT Pembangunan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara II, Ditjen Sumber Daya Air, Tahun Anggaran 2012	63
Tabel L.9	Contoh GAP Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga, Tahun Anggaran 2012	66
	Contoh Format GBS Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga, Tahun Anggaran 2012	67
Tabel L.10	Contoh GAP Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Tahun Anggaran 2012	70
	Contoh Format GBS Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Tahun Anggaran 2012	71
Tabel L.11	Contoh GAP Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Ditjen Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2012	73
	Contoh Format GBS Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Ditjen Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2012	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, antara lain konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan/*Convention on Eliminating All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, kesepakatan Beijing/*Beijing Platform for Action (BPFA)*, pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) diantaranya terkait dengan akses air bersih dan keperluan sanitasi dasar secara konsisten serta meningkatkan kesejahteraan hidup yang signifikan bagi masyarakat yang hidup di permukiman miskin dan kumuh. Salah satu fokus kebijakan nasional pemerintah adalah percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah melihat pentingnya penyediaan infrastruktur, baik dalam fungsinya sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan pendorong sektor ekonomi lainnya maupun sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur tersebut.

Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 telah mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025, dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMN 2010 – 2014.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU Tahun 2010 – 2014, Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi komitmen untuk diterapkan dalam

mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, sampai pada tahap pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Konsep setara dan adil gender harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman.

Setara berarti kesamaan kondisi dan posisi antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kemampuan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), pengakuan terhadap eksistensi, kesempatan berpartisipasi, pengambilan peran dan fungsi secara proporsional mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, maupun pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur P.U. dan Permukiman. Adil dalam hal ini dapat diartikan sebagai tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan, termasuk orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kemampuan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan yang setara dan adil dapat diukur dari bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, kesempatan untuk berpartisipasi, dan mengendalikan proses penyelenggaraan infrastruktur, serta mendapatkan manfaat hasil pembangunan.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan pelaksanaan PUG adalah kurangnya kesadaran para pengambil keputusan akan pentingnya keputusan/kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/kebijakan seringkali bersifat netral gender, yaitu kebijakan/program/kegiatan yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin, tanpa melihat adanya perbedaan akses (peluang/kesempatan untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi/pendapat), dan peluang/kesempatan untuk melakukan kontrol bagi kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang mengakibatkan timbulnya isu/kesenjangan Gender. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meminimalisasi isu/kesenjangan (dalam hal berpartisipasi dan memanfaatkan hasil pembangunan) antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yang dituangkan dalam mekanisme penganggaran, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013 atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L pada tahun anggaran berjalan. Secara garis besar, teknik penyusunan anggaran yang responsif gender/ARG dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Analisis gender; dan (2) penyusunan Gender Budget Statement (GBS).

Selama ini Kementerian PU telah mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggaran, dengan disusunya panduan “Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian PU” pada tahun 2009. Panduan tersebut perlu disempurnakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan perkembangan pelaksanaan PPRG.

1.2. Landasan Hukum

Penerapan PPRG dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman terkait, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menetapkan adanya audit kinerja disamping audit keuangan lainnya yang kemudian memberikan peluang untuk mengintegrasikan audit gender ke dalam audit kinerja
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan sistem perencanaan multi tahunan nasional yang berbasis prioritas, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 (PP No. 90 Tahun 2010) tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), menjabarkan sistem perencanaan tahunan yang berbasis kinerja, yang selanjutnya memberikan peluang

bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di K/L pusat

5. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKAK/L, menjabarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat
6. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014
7. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri No. 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013, dan PMK lain yang berlaku pada tahun berjalan, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
10. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Unifem, Tahun 2010

1.3. Tujuan

Tujuan disusunnya buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian PU adalah untuk memberikan arahan serta meningkatkan kemampuan pengguna di lingkungan Kementerian P.U. dan *Stakeholders* terkait untuk mengimplementasikan PPRG dalam aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan/pelaksanaan, dan pengawasan (atau disebut turbinbang/lakwas).

1.4. Sasaran

Sasaran pengguna buku panduan ini adalah:

1. Para perencana dan pelaksana program dan anggaran serta pelaksana kegiatan, pemantau, dan evaluator di lingkungan Kementerian PU
2. Unit Organisasi Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan III, serta Unit Pelaksana Tugas dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman
3. Para pemangku kepentingan terkait

1.5. Ruang Lingkup

Hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup buku panduan ini adalah PPRG Generik yang berlaku nasional di seluruh K/L; PPRG di Kementerian P.U; Langkah-langkah penyusunan PPRG; serta Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyusunan PPRG di Kementerian PU.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Generik

Pada bab ini dijelaskan mengenai perencanaan dan penganggaran nasional serta perencanaan dan penganggaran responsif gender.

BAB III: PPRG di Kementerian PU

Pada bab ini dijelaskan mengenai sistem perencanaan dan penganggaran di Kementerian PU, serta perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kementerian PU.

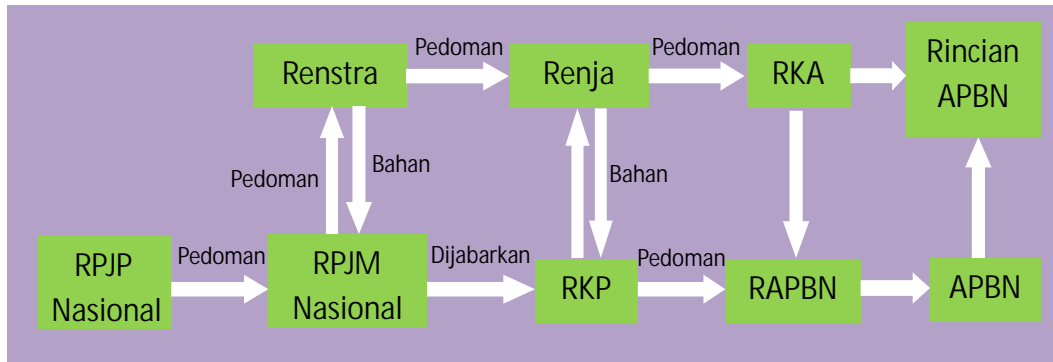
BAB IV: Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan PPRG di Kementerian PU

Penjelasan pada bab ini meliputi pemantauan dan evaluasi PPRG di Kementerian PU serta pelaporan PPRG di Kementerian PU.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER GENERIK

2.1. Perencanaan dan Penganggaran Nasional

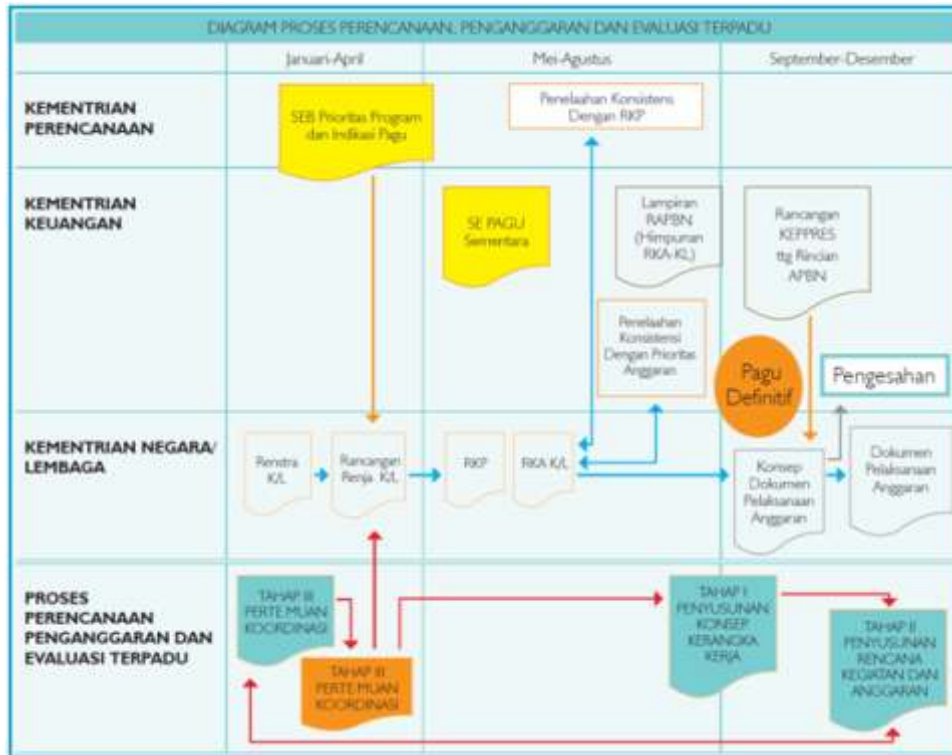
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terintegrasi di dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional (SPPN). SPPN mengacu pada peraturan perundang-undangan yakni UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seperti tertera pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gambar 2.1. di atas memperlihatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku secara nasional di tingkat Pemerintah Pusat, berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan berpedoman pada RKP yang disusun dengan RAPBN, yang kemudian ditetapkan menjadi APBN. Sedangkan RKAK/L yang nantinya akan menjadi rincian APBN disusun berpedoman pada RKP (Pasal 2 Ayat 1 PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKAK/L). Siklus perencanaan dan penganggaran (baca: tahun fiskal) di Indonesia menurut Pasal 4 U.U. No 17 Tahun 2003 dimulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama.¹¹ Siklus perencanaan dan penganggaran dalam satu tahun terdapat pada Gambar 2.2.

¹¹ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 7)



Gambar 2.2. Siklus tahun fiskal Kementerian/Lembaga selama 1 (satu) tahun.
 Sumber: Kementerian Keuangan, diambil dari Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010, halaman 8

Pada Gambar 2.2. diperlihatkan bahwa Renja K/L harus sudah dibuat selambat-lambatnya di bulan April, dengan mengacu pada Renstra KL dan pagu indikatif. Di bulan berikutnya setelah semua Renja K/L dikumpulkan oleh Bappenas, dan seluruh anggarannya dibahas bersama DPR RI, maka ditetapkanlah RKP yang telah memuat pagu sementara. Selanjutnya RKP ini digunakan sebagai landasan dalam menyusun RKAK/L. Kemudian kumpulan dari semua RKAK/L dijadikan bahan Lampiran RAPPBN. Setelah RAPPBN dibahas dan disahkan menjadi APBN, maka ditetapkanlah pagu definitif dan selanjutnya RKAK/L menjadi DIPAs (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) K/L.¹²

¹² Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 8)

2.2. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

2.2.1. Pengertian PPRG dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat, antara perempuan dan laki-laki termasuk kaum lansia, anak-anak, dan disable dalam pelaksanaan pembangunan, yang selama ini masih ada akibat dari konstruksi sosial dan budaya. Tujuan dilaksanakannya PPRG adalah untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.¹³

Berikut ini beberapa konsep tentang PPRG:¹³

- a. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor.
- b. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dalam proses penyusunannya dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan program dan anggaran akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁴

¹³ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 23)

¹⁴ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 55)

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki.¹⁵

Dalam penerapannya ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) yang ada dalam RKAK/L. ARG berada pada level output Kegiatan. Output yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan hendaknya telah melalui analisis gender sebelumnya. Untuk output yang terdapat isu gendernya, terdapat perbedaan dalam tata cara pendokumentasiannya. Namun demikian, meskipun dalam proses penyusunannya telah melalui analisis gender (antara lain menggunakan Gender Analysis Pathway/GAP), tidak semua output harus responsif gender karena terdapat juga output yang netral gender, salah satu contohnya adalah output Layanan Perkantoran.¹⁵ Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Analisis gender, dan (2) penyusunan GBS.¹⁶ Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran yang responsif gender diperlihatkan pada Gambar 2.3.

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori sebagai berikut:¹⁷

- a.** Anggaran Khusus Target Gender, yaitu alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;

¹⁵ PMK No. 94/PMK.02/2013 (halaman 70)

¹⁶ PMK No. 94/PMK.02/2013 (halaman 71)

¹⁷ Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010 (halaman 24)

- b. Anggaran Kesetaraan Gender, yaitu alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol terhadap sumber daya;
- c. Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender, yaitu alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, (termasuk di dalamnya capacity building, advokasi gender, kajian, sosialisasi/diseminasi, publikasi, dan/atau pengumpulan data terpisah).



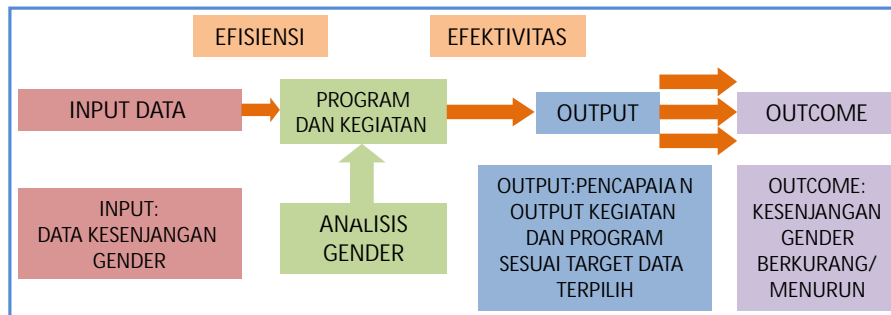
Gambar 2.3. Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Sumber: Pedoman PPRG Generik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010, halaman 26

Sesuai landasan hukum pengelolaan keuangan negara, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran meliputi 3 (tiga) sistem, yakni:¹⁸

1. Penganggaran terpadu, dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKAK/L sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan anggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.
2. Penganggaran berbasis kinerja, merupakan suatu pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kerja.
3. Kerangka pengeluaran jangka menengah, adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

ARG terkait dengan penganggaran berbasis kinerja. Mekanisme penganggaran berbasis kinerja yang berperspektif gender terdapat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Mekanisme penganggaran berbasis kinerja yang berperspektif gender

Sumber: Pedoman PPRG Generik, KPPPA, 2010, halaman 19

¹⁸ Disadur dari PMK No. 94/PMK.02/2013 (halaman 1 - 4)

2.2.2. Urgensi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Alasan mengapa perencanaan dan penganggaran di Kementerian PU perlu responsif gender adalah agar perencanaan dan penganggaran di Kementerian PU menjadi:

a. Lebih Efektif dan Efisien

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

b. Mengurangi Kesenjangan pada Tingkat Penerima Manfaat Hasil Pembangunan

Dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat teridentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana dalam menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dari kebutuhan yang berbeda tersebut. Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisasi.

¹⁹ PMK No. 94/PMK.02/2013 (halaman 69)

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) DI KEMENTERIAN PU

3.1. Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Kementerian PU

Sistem perencanaan dan penganggaran Kementerian PU disusun mengacu pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional/SPPN yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Alur SPPN berdasarkan UU tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.1. (pada Bab 2). Dengan mengacu pada peraturan dan perundangan tersebut, maka lingkup penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian PU mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Pencapaian sasaran kinerja Kementerian PU, yaitu mendukung dan berbasis penataan ruang, mendukung prioritas pembangunan nasional, dan pencapaian sasaran RPJMN, Renstra, dan Renja, serta mendukung implementasi otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab;
2. Peningkatan kualitas program, yaitu mengacu pada kinerja, keterpaduan, dan sinergi (antar sektor dan antar tingkat/level kewenangan), mengikuti kaidah-kaidah teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi standar kelayakan, baik teknik, lingkungan, maupun ekonomi;
3. Penanganan isu-isu strategis sesuai dengan Renstra Kementerian P.U. Tahun 2010-2014, yaitu mengikuti konsepsi kelestarian lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim/*climate change*, mengeliminasi penyebab dan mengatasi bencana, menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, mendukung pengembangan infrastruktur sumber daya air, jalan, keciptakarya, dan mendukung pengembangan penataan ruang; mendukung pengembangan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan; mendukung pengembangan sumber daya manusia; dan mendukung pengarusutamaan gender.

Proses perencanaan dan penganggaran Kementerian PU diuraikan pada Gambar 3.1. berikut.

Gambar 3.1. Proses perencanaan dan penganggaran di Kementerian PU



3.2. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian PU

PPRG di Kementerian PU mengacu pada PPRG secara generik, Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013 (atau yang berlaku), dan terintegrasi di dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian PU untuk mengakomodasi dan mengantisipasi permasalahan/isu/kesenjangan gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman. PPRG di Kementerian PU meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi program, kegiatan, yang berpotensi memiliki isu gender berdasarkan 4 (empat) kriteria (akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat).
2. Melakukan analisis gender checklist (GCL) terhadap Program/Kegiatan yang memenuhi 4 (empat) kriteria pada butir 1 di atas.
3. Pencantuman program dan kegiatan pada matriks dokumen kesepakatan *trilateral meeting*.
4. Identifikasi Output dari Program/Kegiatan yang berpotensi memiliki isu gender (yang diambil dari butir 1 dan 2).
5. Melakukan analisis gender lebih lanjut terhadap Output yang berpotensi memiliki isu gender.
6. Penyusunan dan pelaporan Gender Budget Statement (GBS), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
7. Pencantuman tema ARG untuk output yang dianggarkan responsif gender dan memiliki GBS pada software aplikasi RKA-K/L.

Mekanisme pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian PU terdapat pada Gambar 3.2. berikut ini.

Gambar 3.2. Mekanisme pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran di Kementerian PU



Keterangan Gambar:

- A.** Tahap 1 dan 2 pada butir 3.2
Identifikasi program, kegiatan yang berpotensi memiliki isu gender berdasarkan 4 (empat) kriteria (akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat). Selanjutnya melakukan analisis *Gender Check List* (GCL) terhadap Output Program/Kegiatan yang memenuhi 4(empat) kriteria tersebut.
- B.** Tahap 3 pada butir 3.2
Pencantuman program dan kegiatan pada matriks dokumen kesepakatan *trilateral meeting*.
- C.** Tahap 4, 5, dan 6 pada butir 3.2
Identifikasi Output dari Program/Kegiatan yang berpotensi memiliki isu gender dan melakukan analisis gender lebih lanjut (dengan metode GAP) terhadap Output yang berpotensi memiliki isu gender. Bila diperlukan, dilakukan pendampingan oleh Tim PUG dan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri serta penyusunan dan pelaporan GBS (*Gender Budget Statement*).
- D.** Tahap 7 pada butir 3.2
Pencantuman tema ARG pada software aplikasi RKA-K/L oleh bagian yang menangani program dan anggaran di masing-masing Unit Organisasi (Eselon I, II, III) dan diserahkan kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
- E.** Apabila diperlukan, dilakukan verifikasi terhadap GAP, GBS, dan RKA-K/L sesuai pagu definitif serta koreksi pencantuman tema ARG pada software aplikasi RKA-K/L oleh bagian yang menangani program dan anggaran di masing-masing Unit Organisasi (Eselon I, II, III).

Tahap-tahap PPRG pada Gambar 3.2. diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Identifikasi Program dan Kegiatan yang berpotensi memiliki isu gender berdasarkan 4 (empat) Kriteria (akses, kontrol, partisipasi, manfaat)

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan atau laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Program/kegiatan/Output yang dapat diidentifikasi berpotensi memiliki isu gender adalah program/kegiatan dalam rangka:

- a. penugasan prioritas pembangunan nasional
- b. pelayanan kepada masyarakat/*service delivery*
- c. pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG
(termasuk di dalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilah)
- d. memiliki Output Kegiatan yang berdaya ungkit tinggi (memiliki dampak/*outcome* yang luas bagi masyarakat)

Identifikasi kegiatan yang berpotensi memiliki isu gender dilaksanakan oleh perencana program/kegiatan di tingkat Satker/Balai/Unit Kerja, pada bulan Januari hingga Maret pada tahun anggaran T-1. Selama proses identifikasi dan verifikasi, apabila diperlukan dapat didampingi dari Sekretariat PUG dan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dicantumkan seperti contoh pada Tabel 3.3.

Tabel 3.1. Contoh Kegiatan Prioritas, Sasaran dan Indikator Bidang PU

SUBSTANSI INTI	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	POTENSI ISU (diperoleh dari analisis GCL)
1. Kesehatan Masyarakat (ruang lingkup Ditjen Cipta Karya)	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.063 kawasan dan 4.650 desa	Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sistem penyediaan air minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses SPAM bagi masyarakat terutama kelompok Perempuan. 2. Kurangnya keterlibatan/partisipasi Perempuan dalam kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan SPAM 3. Kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan
2. Tanah dan Tata Ruang (ruang lingkup Ditjen Penataan Ruang)	Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan	Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN	Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya	Belum terakomodasinya aspirasi masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, difable) secara optimal di dalam dokumen-dokumen Penataan Ruang
3. Perumahan Rakyat (ruang lingkup Ditjen Cipta Karya)	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	26.700 unit (270 twin block)	Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastrukturnya	Keterbatasan akses infrastruktur Rusun bagi masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Sumber: RPJMN 2010-2014, Lampiran Buku I: Matriks Prioritas Nasional

3.2.2 Melakukan Analisis *Gender Checklist* (GCL) pada Program/Kegiatan Berpotensi Memiliki Isu Gender (pada Butir 3.2.1)

Cara penggunaan GCL untuk menganalisis Program/Kegiatan yang belum memiliki analisis gender dan diusulkan pada *Trilateral Meeting*, terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang berpotensi memiliki isu gender
- b. Mengidentifikasi isu gender dengan 4 (empat) indikator (AKPM) yaitu:
 - 1) Akses: Adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan peluang/kesempatan memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi atau mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman.
 - 2) Kontrol: Adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi kontrol/pengambilan keputusan/pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman.
 - 3) Partisipasi: Adil dan setara dalam hal peluang/kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman.
 - 4) Manfaat: Adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman, baik fisik maupun non fisik.
- c. Setiap Program/Kegiatan yang memiliki potensi isu gender diberi penjelasan dan ditandai *check* pada kolom "POTENSI ISU".
Hal ini menunjukkan bahwa Program/Kegiatan tersebut perlu diusulkan dalam *Trilateral Meeting* untuk ditindaklanjuti menjadi kegiatan yang responsif gender pada tahun anggaran berikutnya.
Contoh analisis isu gender dengan menggunakan format GCL untuk program/kegiatan yang belum memiliki analisis gender dan diusulkan pada *Trilateral Meeting* seperti pada Tabel 3.2 pada halaman 24.

3.2.3 Pencantuman Nama Program/Kegiatan pada Matriks *Trilateral Meeting* (butir B pada Gambar 3.2.)

Nama-nama Program/Kegiatan yang teridentifikasi berpotensi memiliki isu gender dicantumkan dalam matriks sebagai salah satu materi pada Pertemuan Tiga Pihak/*Trilateral Meeting* yang diadakan pada bulan April T-1. Tabel 3.2 adalah contoh pengisian matriks tersebut.

Tabel 3.3
Format Matriks *Trilateral Meeting* untuk Program/Kegiatan yang dianggarkan Responsif Gender (Contoh pada Lampiran II).

Kode	Program / Kegiatan Prioritas	Indikator	Target pada Tahun Anggaran T	Alokasi Untuk Tahun Anggaran T (Rp. juta)

3.2.4 Identifikasi Output dari Program/Kegiatan yang Berpotensi Memiliki Isu Kesenjangan

Output diperoleh dari program kegiatan yang memiliki isu gender yang diambil dari butir 3.2.1 dan 3.2.2

3.2.5 Analisis Gender lebih lanjut terhadap Output yang berpotensi memiliki Isu Gender (tahap di bulan Maret-April pada butir C Gambar 3.3.)

Program/Kegiatan/Output yang terpilih selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis gender. Ada beberapa metode analisis gender, antara lain Harvard, Moser, SWOT, PROBA, dan GAP. Kementerian PU menggunakan metode analisis *Gender Analysis Pathway/GAP*, dan alat bantu identifikasi isu/kesenjangan gender yang disebut *Gender Checklist/GCL*.

3.2.5.1 Gender Checklist (GCL)

GCL merupakan alat bantu (daftar periksa gender) untuk menemukenali isu gender, selain pada Program/Kegiatan yang diusulkan pada *Trilateral Meeting*, juga pada Program/Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan yang berpotensi memiliki isu gender, dan mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a) Telah memiliki analisis gender/*Gender Analysis Pathway* (GAP) yang telah disusun pada tahun T-1
 - b) Terdapat rencana aksi yang perlu ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya

Cara penggunaan GCL untuk menganalisis Program/Kegiatan yang telah memiliki analisis gender dan rencana aksi yang perlu ditindaklanjuti, terdiri dari langkah-langkah berikut ini:

- i. Mengidentifikasi program/kegiatan yang telah dianalisis dengan GAP (yang telah disusun pada tahun T-1);
- ii. Melakukan pengecekan apakah rencana aksi (yang tertuang pada GAP yang disusun pada tahun T-1) sudah dilaksanakan;
- iii. Mengevaluasi/identifikasi isu gender pada rencana aksi dalam GAP yang disusun pada tahun T-1 dengan kriteria AKPM, seperti yang tercantum pada butir i& ii di atas;
- iv. Bila terdapat potensi isu gender maka perlu diusulkan rencana aksi untuk tahun anggaran berikutnya.

Contoh analisis isu gender dengan menggunakan format GCL terhadap Program/Kegiatan yang telah memiliki analisis gender dan rencana aksi untuk ditindaklanjuti, terdapat pada Tabel 3.4.

- 2) Program/Kegiatan yang terkait dengan aspek Pengaturan (seperti penyusunan peraturan perundangan serta Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria/NSPK), yang diusulkan untuk dianggarkan responsif gender pada 2 –10 tahun mendatang.

Cara penggunaan GCL untuk mengidentifikasi isu/kesenjangan gender pada Program/Kegiatan, yang terkait dengan aspek Pengaturan, terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Mengidentifikasi produk/output pengaturan (peraturan perundangan dan NSPK) dari daftar panjang menjadi daftar pendek, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing Unit Organisasi
- ii. Mengidentifikasi isu gender dengan 4 (empat) indikator AKPM (pada butir 1).ii) dalam format GCL pada Tabel 3.5.
- iii. Merekomendasikan perbaikan untuk mengantisipasi isu gender dan usulan tahun penganggaran untuk pelaksanaan perbaikan tersebut.

Contoh penggunaan format GCL untuk menemukan potensi isu gender pada Program/Kegiatan terkait aspek pengaturan terdapat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.2. Contoh Analisis dengan Metode GCL untuk mengidentifikasi Potensi Isu Gender pada Program/Kegiatan yang belum memiliki analisis gender dan diusulkan pada Trilateral Meeting

PROGRAM/KEGIATAN	IDENTIFIKASI POTENSI ISU (menggunakan indikator APKM)	POTENSI ISU		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
<p>Program: Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</p> <p>Kegiatan: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM</p>	<p>Akses Terbatasnya informasi bagi masyarakat mengenai pengembangan SPAM</p> <p>Terbatasnya kemudahan akses bagi laki-laki, perempuan, orang tua, dan <i>diffable</i> dalam pengembangan SPAM</p> <p>Partisipasi: Terbatasnya kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhannya akan air minum</p> <p>Kontrol: Terbatasnya pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan</p>			<p>Program/Kegiatan ini direkomendasikan untuk diusulkan dalam Trilateral Meeting</p>

Tabel 3.4. Contoh Analisis dengan Metode GCL Pada Program/Kegiatan yang telah memiliki analisis gender dan Rencana Aksi yang perlu ditindaklanjuti

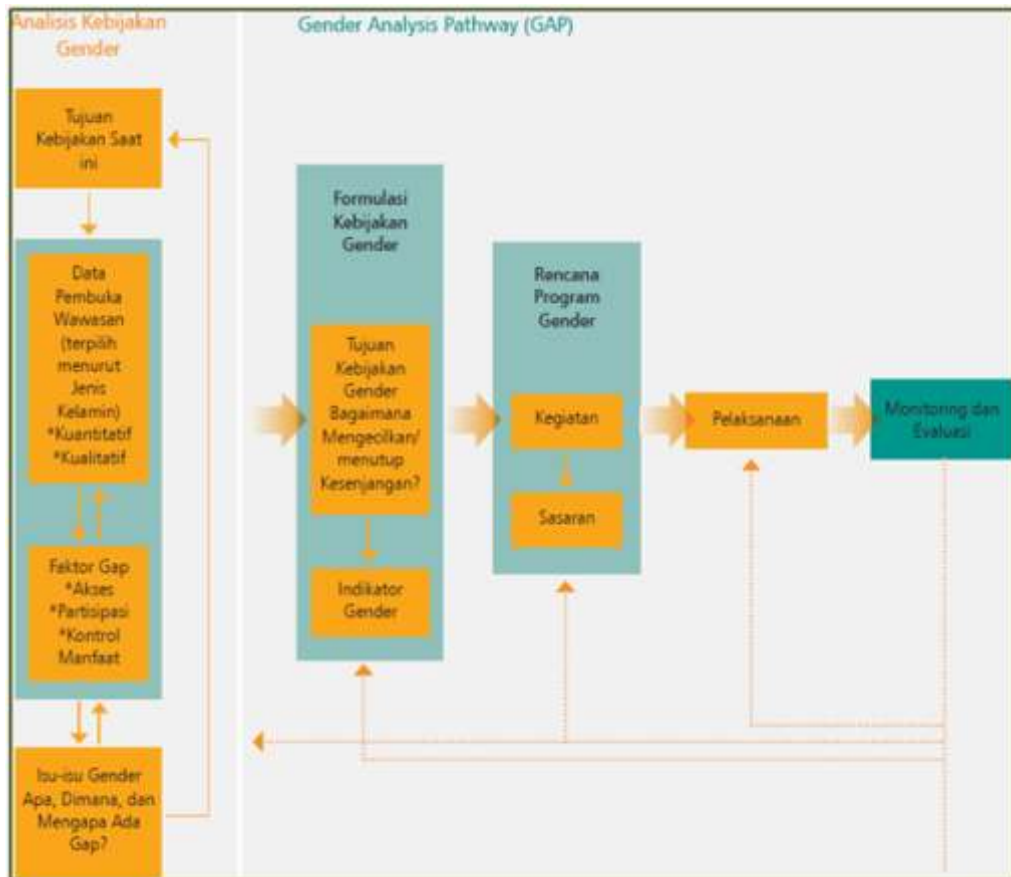
PROGRAM/KEGIATAN /OUTPUT	RENCANA AKSI TERDAHULU	PELAKSANAAN RENCANA AKSI		POTENSI ISU GENDER (menggunkan indikator APKM)	RENCANA AKSI BERIKUTNYA	
		Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan		Diusulkan pada T.A. Berikutnya	Tidak diusulkan pada T.A. berikutnya
Program: Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Permukiman Output: Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	1. Sosialisasi dan konsultasi tentang pelaksanaan proyek dengan masyarakat					
	a. Memastikan laki-laki & perempuan secara seimbang/proportional terwakili dalam semua kegiatan/pertemuan sosialisasi & konsultasi tentang pelaksanaan proyek.	✓				✓ (Alasan dapat berupa: 1. Output dan Outcome sudah tercapai sesuai rencana, atau 2. Rencana aksi belum dilaksanakan pada tahun anggaran T)
	b. Memastikan bahwa kelompok perempuan berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan/ pertemuan sosialisasi dan konsultasi yang diadakan di masyarakat.		✓	Partisipasi: Perempuan cenderung tidak berpartisipasi karena lebih mengutamakan kegiatan rumah tangga	✓ Sosialisasi tentang pelaksanaan proyek dengan cara kunjungan ke rumah-rumah,	
	2. Pembentukan Organisasi Masyarakat Seempat/OMS					
	a. Mendorong kelompok perempuan untuk ikut serta dalam pencalonan dan pemilihan anggota OMS	✓				
	b. Memastikan bahwa perempuan terwakili minimum 30% dalam tiap OMS yang terbentuk		✓	Partisipasi: Jumlah perempuan dalam OMS kurang dari 30%	✓ Sosialisasi tentang OMS dengan cara FGD melibatkan lebih banyak perempuan	

Tabel 3.5 Contoh GCL untuk Identifikasi Isu Gender pada Program/Kegiatan terkait Aspek Pengaturan

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ JUDUL DOKUMEN	RUANG LINGKUP	IDENTIFIKASI POTENSI ISU (menggunakan indikator APKM)	REKOMENDASI TAHUN PELAKSANAAN PERBAIKAN DOKUMEN	
			JANGKA PENDEK (2 – 5 tahun)	JANGKA PANJANG (6 – 10 tahun)
Program: Penyelenggara- raan Jalan Kegiatan: Output: Judul Dokumen: Pedoman Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan	Ketentuan umum, ketentuan teknis, dan cara pengerjaan pra studi kelayakan proyek jalan dan jembatan, baik untuk kegiatan peningkatan maupun pembanguna n jalan dan jembatan	Partisipasi: Pada Sub Bab 5.1.3 "Kajian tentang Pengadaan Tanah", terdapat isu kurangnya keterwakilan kelompok perempuan, baik dari segi penyampaian aspirasi maupun pengambilan keputusan pada tahap <i>focused group discussion</i> (FGD).		

3.2.5.2 Gender Analysis Pathway (GAP)

Salah satu alat analisis gender yang sering digunakan oleh Perencana untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi isu/kesenjangan gender dalam Program, Kegiatan, dan Output adalah GAP. Cara penyusunan GAP terdiri dari 9 (Sembilan) langkah. Nomor 1 - 9 yang tercantum pada Gambar 3.3. adalah langkah-langkah penyusunan GAP, yang dijelaskan pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7



Gambar 3.3. Kerangka penyusunan GAP.

Sumber: Pedoman PPRG Generik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010, halaman 27

Tabel 3.6. Langkah-Langkah Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP)

Langkah 1	Pilih kebijakan/Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen yang akan dianalisis. Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan/output/komponen/sub komponen tersebut.
Langkah 2	Menyajikan data pembuka wawasan untuk melihat apakah ada isu/kesenjangan gender. Data yang dimaksud antara lain data terpilah menurut jenis kelamin, data demografi, data spasial, baik kuantitatif maupun kualitatif.
Langkah 3	Menemukanali isu/kesenjangan gender dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab adanya isu/kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM).
Langkah 4	Menemukanali sebab adanya isu/kesenjangan gender di internal lembaga (budaya organisasi).
Langkah 5	Menemukanali sebab adanya isu/kesenjangan gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan kebijakan/Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen.
Langkah 6	Reformulasi tujuan kebijakan/Program/Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen pembangunan menjadi responsif gender.
Langkah 7	Menyusun rencana aksi dan sarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kebijakan/Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen untuk mengatasi kesenjangan gender.
Langkah 8	Menetapkan data dasar (<i>baseline</i>) untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen. Data dasar ini dapat diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan. Apabila data dasar bersifat kuantitatif, besarnya dapat sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar pada data pembuka wawasan pada langkah 2.
Langkah 9	Menetapkan indikator gender (<i>outcome</i> dari kebijakan/Program/Kegiatan/ Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen), sebagai pengukuran hasil baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlihatkan apakah isu/kesenjangan gender telah menghilang/berkurang (hasil intervensi jangka pendek/tahunan); bertambahnya dan diimplementasikannya kebijakan/program/kegiatan/output/komponen/sub komponen yang responsif gender; 2. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan dalam budaya internal lembaga dan perilaku pada para perencana kebijakan/program/kegiatan/output/komponen/ sub komponen, dengan melakukan analisis gender sebagai salah satu analisis dalam proses perencanaan; 3. Memperlihatkan apakah di masyarakat terjadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses dan atau manfaat dan atau partisipasi dari program pembangunan yang di intervensi, dan atau penguasaan terhadap sumber daya, dan pada akhirnya terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga dan atau di masyarakat.

Sumber: Pedoman PPRG Generik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010, halaman 27

Tabel 3.7. Format Gender Analysis Pathway (GAP)

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar/Baseline	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen	Sajikan data pembuka wawasan. Data yang dimaksud antara lain data terpilah menurut jenis kelamin, data demografi, data spasial (kuantitatif dan kualitatif)	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat	Temu kenali isu gender di internal lembaga dan atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen sehingga menjadi Responsif Gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan baseline	Tetapkan indikator gender (Outcome/hasil keluaran)

3.2.6 Penyusunan dan Pelaporan *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3.2.6.1 *Gender Budget Statement* (GBS)

GBS adalah dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan merupakan hasil pendampingan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.²⁰ GBS juga merupakan bentuk komitmen Pimpinan K/L bahwa perencanaan dan penganggaran K/L tersebut telah berperspektif gender.

Dokumen GBS disusun oleh para perencana dan pelaksana kegiatan di masing-masing Satker/Balai/Unit Kerja, pada bulan Juni–Juli, dengan didampingi oleh Tim PUG P.U. dan KPPPA. Setelah disusun, *softcopy* dokumen GBS diserahkan oleh Satker-satker pelaksana kepada Unit Kerja yang menangani program dan anggaran di masing-masing Unit Organisasi untuk diverifikasi, pada bulan Juli. Hasil verifikasi GBS disampaikan kepada Bagian Program dan Anggaran, Biro PKLN, untuk diverifikasi lebih lanjut dan direkapitulasi, kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.

²⁰ PMK No.94/PMK.02/2013, halaman 71

GBS disusun berdasarkan hasil GAP. Transformasi isi format GAP ke dalam format GBS ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Transformasi GAP ke dalam GBS²²

<i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i>		<i>Gender Budget Statement (GBS)</i>
Langkah 1	Kebijakan/Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output Kegiatan
Langkah 2	Data pembuka wawasan	Analisis situasi
Langkah 3	Faktor kesenjangan	
Langkah 4	Sebab kesenjangan internal	
Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal	
Langkah 6	Reformulasi tujuan	Tujuan output/subouput/komponen/sub komponen
Langkah 7	Rencana aksi	Rencana aksi (komponen/sub komponen yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8	Data dasar (baseline)	Dampak/hasil secara luas dari keluaran kegiatan/output/komponen/sub komponen yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi
Langkah 9	Indikator gender (outcome/dampak Output)	

²² Paparan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, di Kementerian P.U., Tahun 2011

Dokumen GBS terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- 1.** Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output, rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan;
- 2.** Tujuan Output Kegiatan, merupakan rumusan dicapainya output;
- 3.** Analisis situasi, berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, yang berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa output/sub output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada bagian ini juga dijelaskan isu gender pada sub output/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pada level sub output/komponen;
- 4.** Rencana aksi, menerangkan tentang rencana aksi yang akan dilakukan untuk memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender yang telah teridentifikasi pada analisis situasi di atas. Tidak semua suboutput/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya suboutput/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Jika output tersebut mempunyai suboutput, bagian ini menerangkan tentang suboutput yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai suboutput, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;
- 5.** Besar alokasi untuk pencapaian outputnya;
- 6.** Dampak/hasil output kegiatan, merupakan dampak/hasil dari pencapaian output kegiatan, dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;
- 7.** Penanda tangan dokumen GBS adalah penanggung jawab Kegiatan.

Penyusunan GBS dapat menggunakan 2 (dua) format yaitu; 1) format GBS dengan suboutput, dan 2) format GBS tanpa suboutput yang ditunjukkan pada Gambar 3.5 dan 3.6 berikut ini.

²¹ PMK No. 94/PMK.02/2013 (halaman 71-72)

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)			
Nama K/L : (Nama Kementerian Negara/Lembaga)			
Unit Organisasi : (Nama Unit Eselon I sebagai KPA)			
Unit Eselon II/Satker: (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)			
Program	Nama Program hasil restrukturisasi		
Kegiatan	Nama Kegiatan hasil restrukturisasi		
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender		
Output Kegiatan	Jenis, volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasi		
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. • Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantitatif) maka, dapat menggunakan data kualitatif berupa 'rumusan' hasil dari focus group discussion (FGD) • Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu <p>Isu gender pada komponen ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • (isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya) • (hanya komponen yang terdapat isu/kesenjangan gendernya) 		
Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen dicantumkan)	Suboutput	Bagian dari suatu Output. Suboutput ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi	
	Tujuan Suboutput	Uraian mengenai tujuan adanya suboutput setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis Gender Analisis Pathway (GAP) maka dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP.	
		Komponen ...	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput
		Anggaran Suboutput	Rp.
	Suboutput	
Alokasi Anggaran Output kegiatan	(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)		
Dampak/ Hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi		
<p style="text-align: center;">Penanggung jawab Kegiatan NIP/NRP.....</p>			

Gambar 3.4 Format GBS Dengan Sub Output
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012, halaman 189

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)		
Nama K/L	: (Nama Kementerian Negara/Lembaga)	
Unit Organisasi	: (Nama Unit Eselon I sebagai KPA)	
Unit Eselon II/Satker:	(Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)	
Program	Nama Program hasil restrukturisasi	
Kegiatan	Nama Kegiatan hasil restrukturisasi	
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender	
Output Kegiatan	Jenis, volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasi	
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. • Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantitatif) maka, dapat menggunakan data kualitatif berupa 'rumusan' hasil dari focus group discussion (FGD) • Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu <p>Isu gender pada komponen ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • (isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya) • (hanya komponen yang terdapat isu/kesenjangan gendernya) 	
Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen dicantumkan)	Komponen	Tahapan dari suatu Output. Komponen ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi
	Komponen
Alokasi Anggaran Output kegiatan	(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)	
Dampak/ Hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi	
Penanggung jawab Kegiatan NIP/NRP.....		

Gambar 3.5 Format GBS Tanpa Sub Output

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013, halaman 117

3.2.6.2 Kerangka Acuan Kerja/KAK

Untuk Output kegiatan yang telah memiliki GBS, diperlukan KAK yang menunjukkan keterkaitan/relevansi dengan GBS. Keterkaitan ini dapat dilihat terutama dari beberapa penjelasan dalam KAK, yaitu:

- 1) Dasar Hukum dan Gambaran Umum pada Latar belakang (nomor 10 dan 11 pada Gambar 3.7)

Pada Dasar Hukum diuraikan dasar kebijakan berupa penugasan prioritas pembangunan nasional. Pada Gambaran Umum dijelaskan informasi mengenai Output dan analisis situasi berkenaan dengan isu gender yang ada dalam rangka menghasilkan Output kegiatan tersebut.

- 2) Penerima Manfaat (nomor 12 pada Gambar 3.7)

Pada bagian ini dijelaskan siapa penerima manfaat Output kegiatan, baik dari internal atau eksternal Kementerian PU, serta dari Laki-laki dan Perempuan, termasuk anak-anak, dewasa, lansia, serta kaum *difable*.

- 3) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan pada Strategi Pencapaian Keluaran (nomor 14 pada Gambar 3.7)

Pada Bagian ini diuraikan rencana aksi (yang terdapat dalam GBS) sebagai Komponen yang mendukung pencapaian Output kegiatan yang berperspektif gender, bila perlu ditampilkan tabel jadwal pelaksanaan. Pada keterangan Tahapan Pelaksanaan dijelaskan upaya perbaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok Penerima Manfaat.

- 4) Biaya yang diperlukan (nomor 16 pada gambar 3.7)

Biaya yang dimaksud adalah biaya yang diperlukan untuk pencapaian Output, dengan besaran yang sama dengan yang tercantum pada GBS.

Petunjuk lebih lanjut mengenai pengisian KAK terdapat pada Tabel 3.9.

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 20XX	
Kementerian Negara/Lembaga:.....	(1)
Unit Eselon I/II	(2)
Program	(3)
Hasil (Outcome)	(4)
Kegiatan	(5)
Indikator Kinerja Kegiatan	(6)
Keluaran (Output)	(7)
Volume Keluaran (Output)	(8)
Satuan Ukur Keluaran (Output)	(9)
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum (10)	
2. Gambaran Umum (11)	
B. Penerima Manfaat (12)	
C. Strategi Pencapaian Keluaran	
1. Metode Pelaksanaan (13)	
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)	
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran (15)	
E. Biaya yang diperlukan (16)	
Penanggung Jawab	
..... (17)	
NIP: (18)	

Gambar 3.6 Format Kerangka Acuan Kerja/KAK yang berlaku umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013, halaman 113

Tabel 3.9. Petunjuk Pengisian KAK

No.	Uraian
(1)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi nama unit eselon I/II sebagai penanggung jawab Program
(3)	Diisi nama program sesuai dengan dokumen Renja K/L
(4)	Diisi dengan hasil/ <i>outcome</i> yang akan dicapai dalam Program
(5)	Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/L
(6)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan
(7)	Diisi nama/uraian mengenai identitas dari setiap keluaran/ <i>output</i> secara spesifik
(8)	Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas keluaran/ <i>output</i> yang dihasilkan
(9)	Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran/ <i>output</i> sesuai dengan karakteristiknya
(10)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan keluaran/ <i>output</i> kegiatan yang akan dilaksanakan
(11)	Diisi gambaran umum mengenai keluaran/ <i>output</i> kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai
(12)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal Kementerian Negara/Lembaga
(13)	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swa kelola
(14)	Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu/ <i>time table</i> pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang
(15)	Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan
(16)	Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran/ <i>output</i> dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir
(17)	Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan
(18)	Diisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan
<p><u>Keterangan:</u> Dalam hal keluaran/<i>output</i> kegiatan yang bersifat teknis dilaksanakan oleh beberapa Satker dalam Kegiatan yang sama, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KAK/TOR dibuat satu dan berlaku untuk semua Satker, serta ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab Program 2. RAB dibuat oleh masing-masing Satker sebagai lampirannya dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II/Kepala Satker 	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013, halaman 114

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DALAM PENYUSUNAN PPRG DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyusunan PPRG

Pemantauan dan Evaluasi PPRG meliputi:

1. Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyusunan PPRG
2. Pemantauan dan Evaluasi dalam Pelaksanaan PPRG

Lingkup pemantauan dan evaluasi dalam buku ini adalah pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan PPRG yang meliputi :

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2. Dokumen Kesepakatan *Trilateral Meeting*
3. Dokumen Gender Budget Statement (GBS)
4. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)

Pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan PPRG dilakukan oleh Bagian yang menangani Program dan Anggaran di Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PU beserta Tim PUG-PU.

4.1.1. Pemantauan

Pemantauan atau *monitoring* dalam penyusunan PPRG adalah kegiatan memantau proses penyusunan PPRG yang sedang berlangsung dan mengumpulkan data dengan menggunakan indikator yang tercantum dalam RKP. Data yang dikumpulkan berupa dokumen kesepakatan *Trilateral Meeting*, GBS, KAK, dan RKAK/L. Data tersebut dapat disampaikan sebagai laporan kepada pihak-pihak terkait, misalkan sebagai laporan dari Direktorat Bina Program masing-masing Unit Organisasi kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri/PKLN, atau sebagai laporan dari Biro PKLN kepada Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA).

Tujuan dari pemantauan dalam penyusunan PPRG adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan dokumen dan informasi mengenai penyusunan PPRG yang sedang berlangsung, sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin.

Konsistensi muatan yang diperiksa/diperbandingkan antar dokumen dalam pemantauan diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Dokumen dan Muatan yang diperbandingkan pada Pemantauan dalam Penyusunan PPRG

Dokumen yang diperbandingkan	Muatan yang diperbandingkan
1. RKP - <i>Kesepakatan Trilateral Meeting</i>	1. Program 2. Indikator 3. Target
2. <i>Kesepakatan Trilateral Meeting - GAP</i>	1. Program/Kegiatan 2. Indikator Kinerja pada dokumen kesepakatan dengan Output dan Indikator Gender pada GAP 3. Target pada dokumen kesepakatan dengan <i>Baseline</i> pada GAP
3. GAP - GBS	1. Langkah 1 pada GAP dengan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Output Kegiatan pada GBS 2. Langkah 2 - 5 pada GAP dengan Analisis Situasi pada GBS 3. Langkah 6 pada GAP dengan Tujuan Output/Subouput/Komponen/Sub Komponen pada GBS 4. Langkah 7 pada GAP dengan Rencana aksi (komponen/sub komponen yang berkontribusi pada kesetaraan gender) pada GBS 5. Langkah 8 dan 9 pada GAP dengan Dampak/hasil Output pada GBS

Dokumen yang diperbandingkan	Muatan yang diperbandingkan
4. GBS - KAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Eselon I/II 2. Program/Kegiatan/Output/Indikator Kinerja Kegiatan 3. Dampak/Hasil Output pada GBS dengan Hasil/Outcome pada KAK 4. Analisis Situasi pada GBS dengan Dasar Hukum, Gambaran Umum, dan Penerima Manfaat pada KAK 5. Rencana Aksi/Komponen/Sub Komponen pada GBS dengan Tahapan dan Waktu Pelaksanaan pada KAK 6. Alokasi Anggaran Output/Sub Output pada GBS dengan Biaya yang diperlukan pada KAK
5. GBS – RKAK/L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen 2. Anggaran Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi dalam penyusunan PPRG adalah penilaian terhadap proses penyusunan PPRG yang sedang berlangsung atau telah selesai dilakukan, dengan cara membandingkan pencapaian/hasil pemantauan dengan target yang ditetapkan.

Tujuan dari evaluasi dalam penyusunan PPRG adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan penilaian mengenai kelengkapan dan konsistensi muatan dalam dokumen RKP, Trilateral Meeting, GBS, KAK, dan RKAK/L, sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Memberi masukan kepada Unit Kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan dalam penyusunan PPRG

4.2. Pelaporan dalam Penyusunan PPRG

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyusunan PPRG oleh masing-masing Satker/Balai/Unit Kerja. Terdapat 7 (tujuh) pelaporan dalam rangka PPRG yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun (diuraikan pada Gambar 4.1.), yaitu:

1. Pelaporan Daftar Program dan Kegiatan yang dianggarkan Responsif Gender oleh Unit Organisasi pada saat *Trilateral Meeting*
2. Pelaporan Dokumen Analisis Gender dan GBS oleh Unit Organisasi kepada Biro PKLN pada saat pagu indikatif Kementerian P.U. telah ditetapkan
3. Pelaporan Dokumen Analisis Gender dan GBS oleh Biro PKLN kepada KPPPA pada saat pagu indikatif Kementerian P.U. telah ditetapkan
4. Pelaporan Dokumen Analisis Gender dan GBS yang telah diverifikasi oleh KPPPA kepada Kementerian Keuangan
5. Pelaporan Dokumen GBS (yang telah diverifikasi KPPPA) oleh Unit Organisasi kepada Kementerian Keuangan pada saat penelaahan RKAKL
6. Pelaporan koreksi dokumen analisis gender dan GBS oleh Unit Organisasi kepada Biro PKLN setelah pagu definitif ditetapkan
7. Pelaporan koreksi dokumen analisis gender dan GBS oleh Biro PKLN kepada Kementerian Keuangan setelah pagu definitif ditetapkan

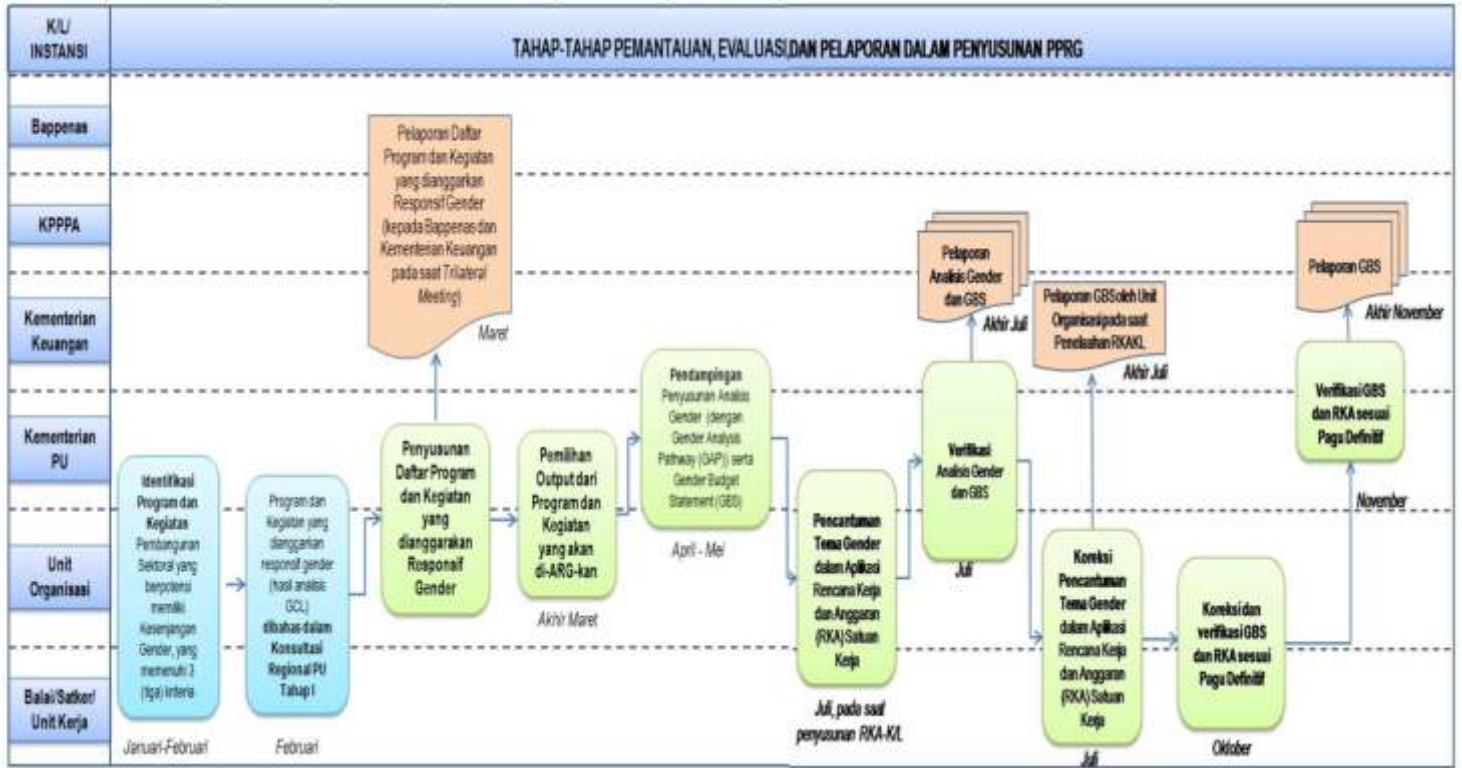
Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyusunan PPRG di Kementerian P.U digambarkan pada Gambar 4.1. dengan uraian sebagai berikut:

1. Januari - Februari
 - a. Balai/Satker/Unit Kerja di Kementerian P.U mengidentifikasi Program, Kegiatan, dan Output yang berpotensi memiliki kesenjangan gender dengan menggunakan analisis GCL.
 - b. Program, Kegiatan, dan Output yang dianggarkan responsif gender dibahas dalam Pra Konsultasi Regional oleh seluruh Unit Kerja yang menangani Perencanaan dan Penganggaran.
2. Maret
 - a. Program dan kegiatan yang dianggarkan responsif gender dilaporkan oleh Biro PKLN kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan pada saat *Trilateral Meeting*
 - b. Output dipilih dari program dan kegiatan yang dianggarkan responsif gender oleh Balai/Satker/Unit Kerja.

3. April - Mei
Penyusunan analisis gender dan GBS oleh Balai/Satker/Unit Kerja pelaksana Program/Kegiatan, dengan didampingi oleh Tim PUG P.U. dan KPPPA.
4. Juni-Juli
 - a. Verifikasi analisis gender dan GBS oleh Unit Kerja yang menangani Perencanaan dan Penganggaran di masing-masing Unit Organisasi Eselon I.
 - b. Pencantuman tema gender dalam aplikasi RKAK/L pada saat penyusunan RKAKL oleh Balai/Satker/Unit Kerja sesuai hasil verifikasi dari masing-masing Unit Organisasi Eselon I.
 - c. Unit-unit Kerja Perencanaan dan Penganggaran di masing-masing Unit Organisasi Eselon I melaporkan dokumen analisis gender dan GBS kepada Biro PKLN untuk diverifikasi lebih lanjut.
 - d. Unit-unit Kerja Perencanaan dan Pengannggaran di masing-masing Unit Organisasi Eselon I melakukan koreksi atas GBS dan RKA sesuai hasil verifikasi dari Biro PKLN.
 - e. Biro PKLN melaporkan dokumen analisis gender dan GBS dari seluruh Unit Organisasi Eselon I di Kementerian P.U. kepada KPPPA untuk ditelaah dan disetujui.
 - f. KPPPA menginformasikan dokumen analisis gender dan GBS yang disetujui untuk dianggarkan responsif gender kepada Biro PKLN.
 - g. KPPPA menyampaikan dokumen GBS Kementerian P.U. yang disetujui kepada Kementerian Keuangan.
 - h. Biro PKLN menyampaikan daftar GBS (yang disetujui oleh KPPPA) kepada Unit-unit Kerja Perencanaan dan Penganggaran di setiap Unit Organisasi Eselon I.
 - i. Masing-masing Balai/Satker/Unit Kerja menyampaikan dokumen GBS (yang disetujui KPPPA dan bertanda tangan Penanggung Jawab Kegiatan) kepada Kementerian Keuangan pada saat penelaahan RKAKL.

5. Oktober - November
 - a. Unit-unit Kerja Perencanaan dan Penganggaran di masing-masing Unit Organisasi Eselon I melakukan koreksi atas GBS dan RKAK/L berdasarkan pagu definitif yang telah ditetapkan, kemudian melaporkannya kepada Biro PKLN.
 - b. Biro PKLN melakukan verifikasi untuk GBS hasil koreksi tersebut. Selanjutnya, hasil verifikasi disampaikan kepada masing-masing Unit Organisasi Eselon I yang melakukan koreksi GBS.
 - c. Unit-unit Kerja Perencanaan dan Penganggaran di masing-masing Unit Organisasi Eselon I melakukan koreksi kembali atas GBS dan RKA berdasarkan hasil verifikasi dari Biro PKLN.
 - d. Biro PKLN melaporkan GBS hasil verifikasi akhir kepada Kementerian Keuangan dan KPPPA.

Gambar 4.1. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan PPRG di Kementerian PU



LAMPIRAN I:
CONTOH DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP)

Tabel L.1. Target Kinerja Pembangunan Pengarusutamaan Gender Tahun 2013 dalam RKP Tahun 2013

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
3.22	Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategis Bidang P.U. dan Permukiman	Jumlah laporan kegiatan dan pembinaan	2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian P.U.	Kementerian Pekerjaan Umum
3.23	Penyusunan, Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang P.U. dan permukiman	1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian P.U.	Kementerian Pekerjaan Umum
3.24	Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang P.U. Lainnya	Jumlah laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bidang P.U. Lainnya	1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian P.U.	Kementerian Pekerjaan Umum
3.25	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pra jabatan, kepemimpinan, teknis, dan fungsional, di bidang P.U. dan permukiman	185	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian P.U.	Kementerian Pekerjaan Umum
3.26	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	Jumlah publikasi melalui berbagai media	2	Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur Kementerian P.U.	Kementerian Pekerjaan Umum

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
3.27	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	Dokumentasi buku, foto, dan film ke-P.U. - an	2	Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur Kementerian P.U.	Kementerian Pekerjaan Umum
3.28	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian P.U.	Jumlah dukungan fasilitasi program Pemerintah 'Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDGs', dan Pengenalan responsif gender di lingkungan Kementerian P.U.	2	Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur Kementerian P.U.	Kementerian Pekerjaan Umum
3.29	Meningkatnya Jumlah IPTEK dan SPMK Bidang Sosekling	Jumlah naskah ilmiah hasil Litbang yang masuk bursa IPTEK	1 buku (naskah ilmiah)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum
3.30	Meningkatnya Jumlah IPTEK dan SPMK Bidang Sosekling	Jumlah naskah kebijakan hasil Litbang yang masuk bursa IPTEK	1 naskah kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum
3.38	Pembinaan Kapasitas Aparatur	Jumlah Pembinaan Kapasitas Aparatur (pelatihan <i>project cycle</i>)	4 Angkatan	Pembinaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum

LAMPIRAN II:
CONTOH DOKUMEN KESEPAKATAN
TRILATERAL MEETING

Tabel L.2. Contoh Matriks ARG pada Dokumen Kesepakatan *Trilateral Meeting* Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2013

Kode	Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2013	Alokasi 2013 (Rp. juta)	Prioritas (N, B, K/L)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian P.U.					
2385	Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategis Bidang P.U. dan Permukiman	Jumlah laporan kegiatan dan pembinaan	2	1.000	K/L
2379	Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran tahunan dan khusus bidang P.U. dan Permukiman	1	250	K/L
2380	Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang P.U. Lainnya	Jumlah laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bidang P.U. lainnya	1	1.200	K/L
2388	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang P.U. dan Permukiman	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pra jabatan, kepemimpinan, teknis, dan fungsional, di bidang P.U. dan permukiman	185	62.003,5	K/L
Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur Kementerian P.U.					
2386	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	Jumlah publikasi melalui berbagai media	2	450	K/L
		Dokumentasi buku, foto, dan film ke-P.U.-an	2	100	K/L
2389	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian P.U.	Jumlah dukungan fasilitasi program Pemerintah Peran Aksi dalam rangka Kegiatan MDGs, dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian P.U.	2	950	K/L

Tabel L.3. Contoh Matriks ARG pada Dokumen Kesepakatan *Trilateral Meeting* Ditjen Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2013

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2013	Alokasi 2013 (Rp. juta)	Prioritas (N, B, K/L)
033.10	Pengelolaan Sumber Daya Air			404,44	
5039	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah buah embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun	164 buah	404,44	N

Tabel L.4. Contoh Matriks ARG pada Dokumen Kesepakatan *Trilateral Meeting* Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2013

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2013	Alokasi 2013 (Rp. juta)	Prioritas (N, B, K/L)
07	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman			2.466.500	
2412	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman				
	Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project (RISE)/Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	34 kecamatan	77.000	N
	Program Penyediaan Infrastruktur Perdesaan-PPIP	Infrastruktur perdesaan	2.600 desa	650.000	N
2413	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Negara				
	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan-P2KP	Keswadayaan masyarakat	10.922 kelurahan	1.498.500	N
2415	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
	Program Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat-Pamsimas	Desa yang terlayani infrastruktur air minum	1.250 desa	241.000	N

LAMPIRAN III:
CONTOH DOKUMEN GAP DAN GBS

49	Sekretariat Jenderal
54	Badan Penelitian dan Pengembangan
58	Badan Pembinaan Konstruksi
62	Ditjen Sumber Daya Air
66	Ditjen Bina Marga
70	Ditjen Cipta Karya
75	Ditjen Penataan Ruang

Tabel L.5. Contoh GAP Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Jenderal, Tahun Anggaran 2012

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p>Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Kegiatan: Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Terselenggaranya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman.</p> <p>Output: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman.</p> <p>TUJUAN Meningkatkan kompetensi Aparatur di lingkungan Kementerian PU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal.</p>	<p>Peserta diklat di lingkungan Kementerian PU adalah sebesar 67,8% dari total pegawai PU, dimana dari angka tersebut 70% diantaranya adalah laki-laki dan 30% adalah perempuan.</p> <p>Adanya indikasi bahwa pegawai laki-laki lebih aktif mencari informasi tentang program Diklat.</p>	<p>Akses :(informasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kementerian PU belum seluruhnya memahami tentang Gender. 2. Program Diklat belum diinformasikan/di publikasikan secara merata/on line <p>Partisipasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya partisipasi peg.Perempuan sebagai peserta Diklat 2. Upaya yang rendah dari pegawai perempuan didalam menanggapi/mendapatkan informasi tentang Program Diklat <p>Manfaat : Informasi tentang program Diklat lebih banyak dimanfaatkan oleh Peg.Laki-laki.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya sosialisasi tentang gender ke seluruh lingkungan Kementerian PU 2. Publikasi tentang Program Diklat masih terbatas (belum dipublikasikan melalui PU-net) 3. Jumlah Peg. Perempuan relatif lebih sedikit dibandingkan Peg.Laki2 (L 75% dan P25%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kecenderungan bahwa Peg.Perempuan lebih memprioritaskan urusan keluarga daripada peningkatan kompetensi dan karir 2. Adanya kecenderungan bahwa bidang ke teknis hanya dikuasai oleh kelompok Laki-Laki 	<p>Meningkatkan persepsi dan pola pikir mengenai Pengarusutamaan Gender pada SDM Aparatur Kementerian PU, melalui Pendidikan dan Pelatihan Budaya Kerja. Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok Aparatur negara yang didasari nilai-nilai yang benar-benar dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari</p>	<p>Penyelenggaraan Pelaksanaan Diklat(secara Swakelola) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey tentang implementasi Budaya kerja dilingkungan Kementerian PU. 2. Melakukan rapat internal tentang rekrutmen peserta Diklat (secara proportional L dan P dan bidang kompetensinya serta jabatan yang diemban) 3. Melakukan koordinasi dengan Biro kepegawaian dalam hal pemanggilan peserta. 4. Mempersiapkan Administrasi dan Akomodasi dan sarana Diklat yang berperspektif Gender (tersedianya ruang menyusui dan kebijakan kemudahan peserta yang sedang menyusui) 5. Melakukan Penyusunan Modul Pengajaran tentang Gender dan PUG (dilaksanakan pada tahun mendatang) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Evaluasi diklat tahun 2010 bahwa peserta diklat adalah sebesar 67,8%, dimana dari angka tersebut 70% diantaranya adalah laki-laki dan 30 % adalah perempuan 2. Belum seluruhnya peserta Diklat memahami tentang Gender dan PUG 	<p>Outcome/Dampak/Hasil output Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pemahaman tentang Gender dan Pengarusutamaan gender di seluruh pegawai Kementerian PU 2. Terwujudnya peningkatan keikutsertaan perempuan dalam Diklat menjadi lebih besar dari 30% total peserta dari keseluruhan Program Diklat yang ada sesuai dengan syarat dan kompetensi yang berlaku. (Diklat Teknis, non Teknis dan Fungsional)

Gender Budget Statement
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian P.U.
Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
Unit Eselon II/ Satker : Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Program	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum
Kegiatan	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman
Indikator Kinerja Kegiatan	Terselenggaranya pendidikan, pelatihan pra jabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman
Output Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman
Analisis Situasi	<p>Secara institusional baik dari sudut pengertian organisasi maupun aturan dan norma yang berlaku, Pusat Pendidikan dan Latihan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan & penyelenggaraan pendidikan kedinasan, pelatihan Prajabatan, teknis, fungsional dan kepemimpinan, memiliki peran yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan gender dalam program-program pembangunan bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.</p> <p>Hal tersebut terkait erat dengan 3 aspek pokok dalam melakukan pengarusutamaan gender yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan perspektif gender dalam perumusan kebijakan di setiap level; 2. Menggunakan momentum dan menciptakan ruang dialog yang terus menerus untuk mengembangkan/menularkan perspektif serta membangun jaringan yang dapat dijadikan instrumen di dalam memperjuangkan keadilan gender; 3. Merumuskan dan membuat model-model pendidikan yang dapat membangun kesadaran, yang dimulai dari rumah tangga, sekolah dan pusat kehidupan masyarakat lainnya.

	<p>Peserta diklat di lingkungan Kementerian P.U adalah sebesar 67,8% dari total pegawai PU, dimana dari angka tersebut 70% diantaranya adalah laki-laki dan 30% adalah perempuan. Terdapat indikasi bahwa pegawai laki-laki lebih aktif mencari informasi tentang program Diklat.</p> <p>Beberapa alasan penyebab isu/kesenjangan secara Internal sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya sosialisasi tentang gender ke seluruh Lingkungan Kementerian P.U. 2. Publikasi tentang Program Diklat masih terbatas (belum dipublikasikan melalui PU-net) 3. Jumlah Pegawai Perempuan relatif lebih sedikit dibandingkan Pegawai Laki-laki (L 75% dan P 25%) <p>Beberapa alasan penyebab isu/kesenjangan secara eksternal sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kecenderungan bahwa Pegawai Perempuan lebih memprioritaskan urusan keluarga daripada peningkatan kompetensi dan karir 2. Adanya kecenderungan bahwa bidang keteknisan hanya dikuasai oleh kelompok Laki-Laki <p>Isu/kesenjangan yang dapat disimpulkan sbb :</p> <p>Akses :(informasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kementerian P.U. belum seluruhnya memahami tentang Gender. 2. Program Diklat belum diinformasikan/dipublikasikan secara merata/<i>online</i> <p>Partisipasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya partisipasi Pegawai Perempuan sebagai peserta Diklat 2. Upaya yang rendah dari Pegawai Perempuan di dalam menanggapi/mendapatkan informasi tentang Program Diklat <p>Manfaat :</p> <p>Informasi tentang program Diklat lebih banyak dimanfaatkan oleh Pegawai Laki-laki.</p> <p>Fungsi-fungsi yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional serta kepemimpinan; 2. penyusunan dan pengembangan kurikulum, materi pengajaran serta
--	---

3. evaluasi, diseminasi kurikulum dan materi pengajaran;
4. pelaksanaan pendidikan kedinasan dan pelatihan prajabatan, teknis, fungsional dan kepemimpinan;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
6. pembinaan, akreditasi dan sertifikasi;
7. pembinaan tenaga pengajar/widyaiswara;

Sangat memungkinkan untuk menjadi ujung tombak bagi penyadaran gender melalui perubahan *mind-set* bagi semua aparatur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan peningkatan kapasitas untuk dapat membentuk mekanisme dalam formulasi kebijakan dan program-program yang responsif gender yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah sehingga intervensi yang akan dilakukan menjadi tepat sasaran.

Peran strategis lainnya dari Pusdiklat yang sangat mendukung dalam upaya pengarusutamaan gender di Kementerian Pekerjaan Umum yaitu sebagai clearing house bagi penyelenggaraan Diklat bidang Pekerjaan Umum yang meliputi :

1. Bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur bidang ke-PU-an, baik di pusat maupun di daerah.
2. Menjamin kesesuaian diklat dengan kebijakan, strategi dan program Unit Satminkal di lingkungan Kementerian PU.
3. Kegiatan koordinasi, standarisasi, akreditasi dan sertifikasi yang berkaitan dengan kediklatan aparatur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
4. Mengumpulkan dan menukarkan informasi serta mendiseminasikan/mensosialisasikan tentang Standar Operasi dan Prosedur kediklatan yang mencakup:
 - a. Penjaringan kebutuhan akan diklat
 - b. Pola diklat
 - c. Tata cara penyusunan dan pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran
 - d. Teknik pengajaran
 - e. Pelayanan pengajar/widyaiswara.

Rencana Aksi	Komponen	Pendidikan dan Pelatihan	
		Sub Komponen	Diklat Budaya Kerja
		Tujuan Sub komponen	Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan persepsi dan pola pikir mengenai pengarusutamaan <i>gender</i> pada SDM Aparatur Kementerian PU, melalui Pendidikan dan Pelatihan Budaya Kerja. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
		Penyelenggaraan Pelaksanaan Diklat(secara Swakelola) : 1. Melakukan survey tentang implementasi Budaya kerja di ling.Kementerian PU. 2. Melakukan rapat internal tentang rekrutmen peserta Diklat (secara proportional L dan P dan bidang kompetensinya serta jabatan yang diemban) 3. Melakukan koordinasi dengan Biro kepegawaian dalam hal pemanggilan peserta. 4. Mempersiapkan Adminstrasi dan Akomodasi dan sarana Diklat yang berperspektif Gender (tersedianya ruang menyusui dan kebijakan kemudahan peserta yang sedang menyusui)	
	Anggaran Sub komponen	Rp. 1.000.000.000,- (4 Angkatan)	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp 7.151.574.000		
Outcome/Dampak/hasil Output Kegiatan	Terwujudnya peningkatan pemahaman tentang Gender dan Pengarusutamaan gender di seluruh pegawai Kementerian P.U. 1. Terwujudnya peningkatan keikutsertaan perempuan dalam Diklat menjadi lebih besar dari 30% total peserta dari keseluruhan Program Diklat yang ada sesuai dengan syarat dan kompetensi yang berlaku. (Diklat Teknis, non Teknis dan Fungsional)		

Tabel L.6. Contoh GAP Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Tahun Anggaran 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu		Kebijakan & Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
			Sebab Internal	Sebab Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rincian Kegiatan/Rencana Aksi	Baseline Data	Indikator
<p>Program: Litbang Kementerian Pekerjaan Umum.</p> <p>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah pedoman hasil Litbang yang masuk Bursa Iptek</p> <p>Output: Konsep Pedoman Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan</p> <p>Suboutput: Konsep pedoman sub-bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan.</p> <p>Tujuan Sub Output: Tersusunnya konsep pedoman Sub-Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan.</p> <p>Komponen : Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Sub Komponen: Pengkajian Instrumen Kesetaraan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum.</p> <p>Tujuan Subkomponen: Mendapatkan instrumen untuk mengukur tingkat responsif gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastuktur PU dan permukiman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman sering dianggap netral gender yaitu kebijakan/program/kegiatan yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. Belum seluruh pelaku pembangunan memahami tentang gender. Belum tersedianya gambaran tentang responsivitas gender di tingkat pelaku pembangunan infrastuktur PU dan Permukiman. 	<p>Akses: Masih terbatasnya penyebaran informasi tentang gender di kalangan para pelaku pembangunan di lingkungan Kementerian PU dan mitra kerja.</p> <p>Partisipasi: Kurangnya/rendahnya peran/partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan infrastuktur PU dan Permukiman.</p> <p>Terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk menempati posisi strategis dalam struktur pengambilan keputusan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi tentang gender bagi para pelaku pembangunan di lingkungan Kementerian PU dan mitra kerja Di kalangan para pelaku pembangunan di lingkungan Kementerian PU beserta mitra kerja belum/kurangnya mempunyai wawasan/perspektif gender. 	<ol style="list-style-type: none"> Pandangan masyarakat umum bahwa pembangunan infrastuktur lebih banyak melibatkan aktivitas fisik dan alat berat sehingga lebih cocok dilakukan oleh laki-laki. Adanya anggapan dari masyarakat pada umumnya bahwa perempuan tidak cocok bekerja di dunia konstruksi. 	<p>Tersusunnya instrumen untuk mengukur tingkat responsif gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastuktur P.U. dan Permukiman</p>	<p>Melakukan pengkajian instrumen kesetaraan gender di Kementerian P.U. (Bidang Bina Marga dan Cipta Karya) melalui uji coba lapangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sebagian besar para pelaku pembangunan belum menyadari adanya isu kesetaraan gender dalam pembangunan infrastuktur P.U. dan permukiman. Belum terukurinya tingkat responsif gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastuktur P.U. dan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya gambaran tentang tingkat responsivitas para pelaku pembangunan di lingkungan Kementerian P.U. dan mitra kerja. Termanfaatnya instrumen kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastuktur P.U. dan permukiman

Gender Budget Statement
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian P.U.
 Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan
 Unit Eselon II/ Satker : Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan

Program	Litbang Kementerian Pekerjaan Umum
Kegiatan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah pedoman hasil Litbang yang masuk bursa IPTEK
Output Kegiatan	Konsep Pedoman Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan
Analisa Situasi	<p>Konferensi Dunia ke-IV yang diselenggarakan di Beijing, China tahun 1995 yang bertema “Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian” menghasilkan Deklarasi Beijing dan Rencana Aksi untuk kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Konferensi ini meminta Pemerintah dan pihak terkait untuk mengarusutamakan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program, sehingga, sebelum keputusan diambil, dibuat analisis tentang efeknya terhadap perempuan dan laki-laki.</p> <p>Indonesia turut berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam seluruh dimensi pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender. Sebagai pilot percontohan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di level kementerian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mempunyai visi menyelenggarakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang handal menyadari bahwa dalam tugasnya rentan terhadap isu gender. Dalam penyelenggaraannya infrastruktur PU dan permukiman seringkali dianggap netral gender. Padahal, kebijakan yang netral gender tetap memiliki dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki.</p> <p>Oleh karena itu, perlu dilakukan Gender Impact Assessment untuk menghindari konsekuensi negatif yang tidak diharapkan dari kebijakan</p>

	<p>yang netral gender serta untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kebijakan. Kementerian Pekerjaan Umum berupaya menerapkan strategi pengarusutamaan gender dari 3 aspek, yaitu aspek produk infrastruktur, aspek proses penyelenggaraan kegiatan, dan aspek input/kebijakan dan lingkungan strategis.</p> <p>Puslitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan (Sosekling) sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian PU yang berfungsi menyiapkan standar, pedoman dan manual aspek sosial, ekonomi dan lingkungan berupaya untuk melakukan Gender Impact Assessment. Pada tahun 2011 dan 2012 telah dilakukan kegiatan “Pengkajian Instrumen Kesetaraan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum” yang menghasilkan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman (survei, investigasi, desain, pengadaan lahan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur) dengan sasaran penilaian yaitu para pelaku yang terlibat dalam proses tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2013, Puslitbang Sosekling akan menyusun instrumen kesetaraan gender yang dapat menilai tingkat responsif gender dari produk infrastruktur P.U. dan permukiman dengan sasaran penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>).</p>		
Rencana Aksi	Sub Output	Konsep Pedoman Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan	
	Tujuan Sub Output	Tersusunnya Konsep Pedoman Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan	
	Komponen	Penelitian dan Pengembangan	
		Sub Komponen	Pengkajian Instrumen Kesetaraan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum (Bidang Bina Marga dan Cipta Karya)
	Tujuan Sub Komponen	Tersusunnya instrumen untuk mengukur tingkat responsif gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman.	

		Alokasi Anggaran Sub Komponen	Rp 291.420.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 1.391.420.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)		
Dampak/hasil Output Kegiatan	1. Terwujudnya gambaran tentang tingkat responsivitas para pelaku pembangunan di lingkungan Kementerian PU dan mitra kerja. 2. Termanfaatkannya instrumen kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman		

Tabel L.7. Contoh GAP Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi, Tahun Anggaran 2012

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p>Program : Pembinaan Konstruksi</p> <p>Kegiatan: Penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi</p> <p>Pembinaan konstruksi</p> <p>Indikator kinerja kegiatan: Jumlah NSPK Pembinaan Jasa konstruksi</p> <p>Output: NSPK Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Suboutput : Penyusunan Juklak dan surat Edaran Menteri P.U. tentang penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di sektor konstruksi bagi Nakerkons Indonesia.</p> <p>Tujuan : Tersusunnya Juklak dan Surat edaran Kepmen PU tentang perlunya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di sektor konstruksi bagi Nakerkons Indonesia</p>	<p>Pekerja Konstruksi yang sebagian besar laki-laki usia produktif (20-40thn) Sangat rentan terjangkit penyakit menular HIV/AIDS, karena belum mempunyai pengetahuan pencegahan penyakit HIV/AIDS dan jauh dari keluarga dalam waktu yang lama serta mempunyai uang, sehingga mendorong adanya transaksi komersial seks. Demikian juga sebagian besar istri/anak dari pekerja konstruksi semakin rentan terhadap penyakit menular seksual dan HIV/AIDS yang ditularkan suaminya.</p>	<p>Akses (informasi):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya informasi bagi para pekerja konstruksi /istri/anak terhadap bahaya serta pencegahan penyakit menular dan HIV/AIDS. Lokasi tempat kerja Nakerkons jauh dari keluarga (akses rendah) serta waktu yang lama utk meninggalkan keluarga. Adanya peluang/kemudahan untuk melakukan transaksi seksual 	<ol style="list-style-type: none"> Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sebagai acuan untuk Satker/ penanggung jawab kegiatan dan Penyedia Jasa. Sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan tentang HIV/AIDS belum dilaksanakan secara optimal ditingkat Satker dan Penyedia Jasa. Bahkan bagi nakerkons Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi seksual (tumbuhnya tempat-tempat transaksi seksual berdekatan dengan lokasi kerja) Kurangnya Kepedulian sosial tentang Bahaya penyakit menular dan HIV/AIDS. Belum tersedianya pembinaan takwa bagi para pekerja konstruksi 	<p>Tersusunnya Juklak dan Surat edaran Menteri PU tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di sektor konstruksi bagi Nakerkons Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Juklak dan SE Menteri P.U. <ol style="list-style-type: none"> Persiapan: Review Policy Paper tentang Implementing HIV and AIDS Prevention in The Construction Sector Pelaksanaan: Tahap 1: Penyusunan R0, R1, R2 Juklak Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di sektor konstruksi. Tahap 2: Penyusunan konsep R3 Juklak Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di sektor Konstruksi (Legal drafting) Tahap 3: Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) dalam rangka menyempurnakan konsep R2 dan R3 yang dilaksanakan secara konsinyasi dan melibatkan nara sumber lintas Unit Organisasi. Tahap 4: Mengintegrasikan Data-data Policy Paper tentang Implementing HIV/AIDS Prevention in the construction sector dan kajian lainnya yang terkait Pelaporan: Finalisasi Juklak dan penyusunan penetapan SE Menteri PU (Penandatanganan) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di 	<p>Menyusun dan menetapkan Surat Edaran Kepmen PU tentang perlunya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sebagai acuan untuk Satker/ Penanggung jawab kegiatan dan Penyedia Jasa dalam pelaksanaan Sosialisasi bagi Nakerkons.</p>	<p>Outcome/Dampak/Hasil output Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya Juklak sebagai acuan untuk pelaksanaan sosialisasi bagi penanggung jawab kegiatan (Satker dan Penyedia jasa) Terpublikasinya Juklak dan Surat Edaran Menteri PU sebagai payung hukum tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di sektor konstruksi bagi Nakerkons. Terwujudnya kegiatan sosialisasi yang dapat dilaksanakan secara optimal (dimasa mendatang) Terwujudnya peningkatan pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bagi nakerkons Indonesia (dimasa mendatang)

Gender Budget Statement
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian PU
 Unit Organisasi : Badan Pembinaan Konstruksi
 Unit Eselon II/ Satker : Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi

Program	Pembinaan Konstruksi
Kegiatan	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Konstruksi
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah NSPK Pembinaan Jasa Konstruksi
Output Kegiatan	<i>NSPK Pembinaan Jasa Konstruksi</i> .
Analisa Situasi	<p>Pekerja Konstruksi yang sebagian besar laki2 usia produktif (20-40thn) Sangat rentan terjangkit penyakit menular HIV/Aids , karena belum mempunyai pengetahuan pencegahan penyakit HIV/AIDS dan jauh dari keluarga dalam waktu yang lama serta mempunyai uang, sehingga mendorong adanya transaksi komersial seks. Demikian juga sebagian besar istri /anak dari pekerja konstruksi semakin rentan terhadap penyakit menular seksual dan HIV/AIDS yang ditularkan suaminya Selain para pekerja, para kontraktor dan atau pegawai kelas menengah di sektor konstruksi juga mempunyai kerawanan tersendiri terhadap penularan HIV, yaitu adanya suatu kemampuan untuk membeli transaksi seksual. Istilah bagi kerawanan di tingkat ini adalah <i>"man, mobile, (have) money"</i> yaitu orang dengan mobilitas tinggi yang mempunyai uang untuk transaksi seksual sehingga rentan terhadap penularan HIV dan IMS.</p> <p>Beberapa alasan penyebab isu/kesenjangan secara internal sbb ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sebagai acuan untk Satker/penanggung jawab kegiatan dan Penyedia Jasa. 2. Sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulan tentang HIV/AIDS belum dilaksanakan secara optimal ditingkat Satker dan Penyedia Jasa maupun bagi nakerkons Indonesia.

	<p>Beberapa alasan penyebab isu/kesenjangan secara eksternal sbb ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi seksual (tumbuhnya tempat2 utk transaksi seksual berdekatan dengan lokasi kerja) 2. Kurangnya Keperdulian sosial tentang Bahaya penyakit menular dan HIV/Aids. 3. Belum /kurangnya pembinaan takwa bagi para pekerja konstruksi <p>Isu/kesenjangan yang dapat disimpulkan sbb :</p> <p>Akses (informasi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya informasi bagi para pekerja konstruksi /istri/anak2 terhadap bahaya serta pencegahan penyakit menular dan HIV/AIDS. 2. Lokasi tempat kerja Nakerkons jauh dari keluarga (akses rendah) serta waktu yang lama utk meninggalkan keluarga. 3. Adanya peluang/kesempatan utk melakukan transaksi seksual <p>Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya payung hukum mengenai pencegahan penyakit HIV dan AIDS bagi tenaga kerja (Nakerkons) di sektor konstruksi.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk melakukan penyusunan peraturan (Kepmen PU) mengenai pencegahan HIV dan AIDS khususnya di sektor konstruksi. Dengan disusunnya peraturan tersebut nantinya akan menjadi dasar dan pedoman dari Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Sektor Konstruksi, sehingga akan memberikan arah dan integritas dalam pelaksanaannya.</p>			
Rencana Aksi	Sub Output	Penyusunan Juklak dan Surat Edaran Menteri PU tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di sektor konstruksi bagi Nakerkons Indonesia.		
	Tujuan	Tersusunnya Juklak dan Surat Edaran Menteri PU tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di sektor konstruksi bagi Nakerkons Indonesia.		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="692 1265 887 1407">Komponen 1</td> <td data-bbox="887 1265 1361 1407">Persiapan : Review Policy Paper tentang Implementing HIV and AIDS Prevention in The Construction Sector</td> </tr> </table>	Komponen 1	Persiapan : Review Policy Paper tentang Implementing HIV and AIDS Prevention in The Construction Sector
Komponen 1	Persiapan : Review Policy Paper tentang Implementing HIV and AIDS Prevention in The Construction Sector			

		Komponen 2	<p>Pelaksanaan :</p> <p>Tahap1 :Penyusunan R 0, R1, R2 Juklak Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di sektor konstruksi.</p> <p>Tahap2 :Penyusunan konsep R3 Juklsk Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di sektor Konstruksi (Legal drafting)</p> <p>Tahap 3 : Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) dalam rangka menyempurnakan konsep R2 dan R 3 yang dilaksanakan secara konsinyasi dan melibatkan nara sumber lintas Unit Organisasi.</p> <p>Tahap 4 : Menintegrasikan Data -data Policy Paper tentang Implementing HIV/AIDS Prevention in the construction sector dan kajian lainnya yang terkait</p>
		Komponen 3	<p>Pelaporan:</p> <p>Finalisasi Juklak dan penyusunan penetapan SE Menteri PU (Penandatanganan) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di sektor konstruksi bagi Nakerkons Indonesia.</p>
		Anggaran Suboutput	Rp 400.000.000,-
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 1.228.975.000		
Dampak/hasil Output Kegiatan	<p>1.Tersedianya Juklak s ebagai acuan untuk pelaksanaan sosialisasi bagi penanggung jawab kegiatan (Satker dan Penyedia jasa)</p> <p>2.Terpublikasikannya Juklak dan Surat Edaran Menteri PU sebagai payung hukum tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di sektor konstruksi bagi Nakerkons.</p>		

Tabel L.8. Contoh GAP SNVT Pembangunan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara II, Ditjen Sumber Daya Air, Tahun Anggaran 2012

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
					Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base Line)	Indikator Gender
<p>Program : Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya.</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan : Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan oprasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya dan juga dengan melaksanakan perlindungan/konservasi kawasan sumber air.</p> <p>Output Kegiatan : Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun.</p> <p>Komponen : Pembangunan</p> <p>Tujuan : Terbangunnya Embung kecil 75 buah dan Embung Irigasi 2 buah yang tersebar di Propinsi NTT.</p>	<p>Propinsi NTT sebagai salah satu daerah kering dan curah hujan rendah sering mengalami masalah kelangkaan sumber air baku. Karena itu sangat diperlukan pengembangan Sarana dan prasarana penyediaan air baku guna mengoptimalkan pemanfaatan air hujan pada musim kemarau, antara lain dengan membangun embung. Ketersediaan air yang kurang sangat menyulitkan kehidupan masyarakat terutama kaum perempuan dan anak2 dalam melakukan aktifitas domestik (mandi, cuci masak) serta menjaga cara 2 kehidupan yang sehat. Dimusim kemarau perempuan dan anak2 berjalan kaki 1-2 km untuk mendapatkan air bersih dan dalam jumlah terbatas.</p>	<p>Akses :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses (daya capai yang rendah) Sumber airbaku bagi masyarakat terutama kaum perempuan dan anak2. 2. Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama perempuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan bangunan penampung air. <p>Partisipasi : Kurangnya peluang/kesempatan bagi kelompok perempuan untuk menyampaikan aspirasi dim penentuan lokasi pembangunan dan keterlibatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan bangunan penampung air.</p> <p>Kontrol : Kurangnya peluang/kesempatan bagi kelompok perempuan dalam pengendalian pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya ketersediaan Bangunan penampung air terutama untuk keperluan domestik pada musim kemarau. 2. Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terutama perempuan dan anak2 dim pengelolaan/pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan penampung air. 3. pemerintah kurang menyadari potensi SDM/terutama perempuan dan anak2 di lokasi setempat yang bisa memberikan masukan dan dilibatkan dim proses penentuan lokasi dan pengelolaan/pemeliharaan bangunan penampung air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa perencanaan (penentuan Lokasi) serta pengelolaan/pemeliharaan Bangunan penampung air se-mata2 adalah urusan pemerintah. 2. Kurangnya pengetahuan di masyarakat terutama kelompok perempuan dalam pengelolaan /pemeliharaan bangunan Penampung air. 	<p>Terbangunnya Embung kecil sebanyak 75 buah dan embung irigasi 2 buah yang tersebar di propinsi NTT dan yang responsif Gender.</p>	<p>Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan embung dgn melibatkan kelompok perempuan. 2. Melakukan sosialisasi tentang perlunya masyarakat (termasuk kelompok perempuan dan anak2) untuk mengelola dan memelihara bangunan penampung air 3. Mengembangkan Kelompok Pengguna air dengan lebih banyak melibatkan kelompok perempuan. (keseitaraan gender) 4. Melakukan identifikasi item pekerjaan yang memungkinkan partisipasi perempuan didalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan bangunan penampung air. 5. Melaksanakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok perempuan pada pekerjaan2 yang dapat dilakukan oleh perempuan dan partisipasinya dalam pengelolaan /pemeliharaan bangunan penampung air. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data embung yang telah dibangun sejak Thn 1980 s/d 2011, embung kecil 520 buah dan embung irigasi 28 buah. 2. target embung kecil yang akan dibangun 75 buah dan embung irigasi 2 buah. 3. Pelibatan masyarakat terutama kelompok perempuan dan anak2 dalam penentuan lokasi dan pengelolaan/pemeliharaan bangunan penampung air. 	<p>Outcome/ dampak/Hasil Output Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kemudahan akses pada Sumber air. 2. Terwujudnya peningkatan pemahaman bagi masyarakat terutama kelompok perempuan dalam pengelolaan /pemeliharaan bangunan penampung air. 3. Terwujudnya peningkatan peran masyarakat terutama kelompok perempuan dalam hal penyampaian aspirasi dan partisipasi dalam pengelolaan/pemeliharaan bangunan penampung air.

Gender Budget Statement
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian PU
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
 Unit Eselon II/ Satker : SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara II, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program	Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun
Output Kegiatan	Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun
Analisis Situasi	<p>Propinsi NTT sebagai salah satu daerah kering dan curah hujan rendah sering mengalami masalah kelangkaan sumber air baku. Karena itu sangat diperlukan pengembangan Sarana dan prasarana penyediaan air baku guna mengoptimalkan pemanfaatan air hujan pada musim kemarau , antara lain dengan membangun embung. Ketersediaan air yang kurang sangat menyulitkan kehidupan masyarakat , terutama kaum perempuan dan anak2 dalam melakukan aktifitas domestik (mandi, cuci masak) serta menjaga cara-cara kehidupan yang sehat. Di musim kemarau perempuan dan anak-anak berjalan kaki 1-2 km untuk mendapatkan air bersih dan dalam jumlah terbatas</p> <p>Beberapa alasan penyebab adanya isu/kesenjangan secara internal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya ketersediaan Bangunan penampung air terutama untuk keperluan domestik pada musim kemarau. 2. Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak dalam pengelolaan/pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan penampung air. 3. Pemerintah kurang menyadari potensi SDM(terutama perempuan dan anak-anak) yang bisa memberikan masukan dlm proses penentuan lokasi serta partisipasi dalam pengelolaan/pemeliharaan bangunan penampung air

	<p>Beberapa alasan penyebab adanya isu/kesenjangan secara eksternal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa perencanaan (penentuan Lokasi) serta pengelolaan/pemeliharaan bangunan penampung air se-mata2 adalah urusan pemerintah. 2. Kurangnya pengetahuan di masyarakat terutama kelompok perempuan dalam pengelolaan/pemeliharaan bangunan Penampung air <p>Isu/kesenjangan yang dapat disimpulkan adalah sbb;</p> <p>Akses: Terbatasnya akses (daya capai yang rendah) Sumber airbaku bagi masyarakat terutama kaum perempuan dan anak2. Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama perempuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan bangunan penampung air.</p> <p>Partisipasi: Kurangnya peluang/kesempatan bagi kelompok perempuan untuk menyampaikan aspirasi dlm penentuan lokasi pembangunan.dan keterlibatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan bangunan penampung air.</p> <p>Kontrol: Kurangnya peluang/kesempatan bagi kelompok perempuan dalam pengendalian pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air.</p>	
Rencana Aksi	Komponen	Pembangunan dengan tahapan sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan embung dgn melibatkan kelompok perempuan. 2. Melakukan sosialisasi tentang perlunya masyarakat(termasuk kelompok perempuan dan anak2) untuk mengelola dan memelihara bangunan penampung air 3. Mengembangkan Kelompok Pengguna air dengan lebih banyak melibatkan kelompok perempuan.(keseitaraan gender) 4. Melakukan identifikasi item pekerjaan yang memungkinkan partisipasi perempuan didalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan bangunan

		5. Melaksanakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok perempuan pada pekerjaan ² yang dapat dilakukan oleh perempuan dan partisipasinya dalam pengelolaan /pemeliharaan bangunan penampung air.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp. 93.934.995.000 (Sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Dampak/hasil Output Kegiatan		<p>1.Terwujudnya kemudahan akses pada Sumber air.</p> <p>2.Terwujudnya peningkatan pemahaman bagi masyarakat terutama kelompok perempuan dalam pengelolaan /pemeliharaan bangunan penampung air.</p> <p>3.Terwujudnya peningkatan peran masyarakat terutama kelompok perempuan dalam hal penyampaian aspirasi dan partisipasi dalam pengelolaan/pemeliharaan bangunan penampung air</p>

Tabel L.9. Contoh GAP Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga, Tahun Anggaran 2012

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu		Gender	Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Internal		Sebab Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rincian Kegiatan/ Rencana Aksi	Baseline Data
<p>Program: Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Kegiatan: Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan</p> <p>Indikator kinerja kegiatan : Tersedianya tanah untuk Jalan Bebas hambatan /jalan Tol</p> <p>Output: Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan / Jalan Tol</p> <p>Sub Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Prov. Sumatera Utara; Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Prov. Jawa Barat; Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Prov. Jawa Tengah; Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Prov. Jawa Timur. <p>Tujuan: Tersedianya tanah untuk jalan bebas hambatan / jalan tol.</p>	<p>Kegiatan pembebasan tanah adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat dari tingkat persiapan s/d pelaksanaan. Sosialisasi/penyulu- han tentang pembebasan lahan pada umumnya dihadiri oleh kelompok laki-laki saja. Karena kelompok laki-laki dianggap telah mewakili istri dan anggota keluarga lainnya dan juga karena peserta yang diundang sesuai dengan nama pemegang hak milik atas tanah yang terkena pembebasan,</p>	<p>Akses: Kurangnya informasi bagi kelompok perempuan dan anak2 dalam hal akan diadakannya kegiatan pembebasan Tanah Partisipasi : Kurangnya peluang/kesempatan bagi kelompok perempuan utk ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan. 2. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam hal pengambilan keputusan untuk areal yang akan dibebaskan serta keputusan penetapan harga ganti rugi. Manfaat : Kegiatan pembebasan tanah pada umumnya kurang dirasakan manfaatnya bagi kelompok perempuan Karena banyak kelompok laki2/kaum bapak sebagai kepala keluarga yang tidak memberikan info tentang besaran ganti rugi yang diperoleh bahkan dipakai untuk kepentingannya sendiri (seperti kawin lagi)</p>	<p>Belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) atas kesetaraan gender dalam sub output sosialisasi/penyuluhan seingga pemrakarsa tidak dapat menentukan kuota jumlah undangan perempuan dan laki- laki yang dapat mengikuti kegiatan sosialisasi/ penyuluhan karena terkait dengan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa peserta sosialisasi/penyuluhan harus pemegang hak atas tanah tersebut, atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa dimana 1 orang hanya dapat menerima kuasa dari 1 pemilik hak.</p>	<p>Adanya asumsi bahwa suara laki- laki selalu kepala keluarga sudah mewakili suara perempuan selaku istri maupun anggota keluarga yang lain. Sehingga perempuan/istri dianggap tidak perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga mereka tidak mengetahui informasi rinci terkait rencana pembebasan lahan yang terkena rencana trase jalan tol; tidak dapat ikut menentukan nilai Uang Ganti Rugi tanah; dan Uang Ganti Rugi tanah tersebut terkadang tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan aspirasi istri/anggota keluarga yang lain.</p>	<p>Tersedianya tanah untuk jalan bebas hambatan / jalan tol dengan memperhatikan dan mempertim- bangkan kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak perempuan tanah baik kelompok laki-laki maupun perempuan .</p>	<p>1.Menyusun Petunjuk teknis untuk sosialisasi/penyulu- han kegiatan Pembebasan tanah dengan mempertimbangkan kesetaraan /keadilan bagi laki dan perempuan dari tingkat persiapan sampai dengan pelaksanaan.</p> <p>2.Melaksanakan kegiatan pembebasan Tanah dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan dengan melibatkan masyarakat secara adil/merata baik kelompok laki-laki maupun perempuan.</p>	<p>Keterlibatan masyarakat secara adil dan setara baik bagi masyarakat kelompok laki- laki maupun perempuan yang terkena dampak dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan.</p>	<p>Terwujud nya peningkatan peran/keterlib- a-tan kelompok perempuan dalam kegiatan pembebasan tanah dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan</p>

Gender Budget Statement
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian P.U.
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga
Unit Eselon II/ Satker : Direktorat Bina Teknik

Program	Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan
Indikator Kinerja Kegiatan	Tersedianya tanah untuk jalan bebas hambatan /jalan tol
Output Kegiatan	Pengadaan tanah jalan bebas hambatan
Analisa Situasi	<p>Kegiatan pembebasan tanah adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat dari tingkat persiapan s/d pelaksanaan. Sosialisasi/penyuluhan tentang pembebasan lahan pada umumnya dihadiri oleh kelompok laki-laki saja. Karena kelompok laki-laki dianggap telah mewakili istri dan anggota keluarga lainnya. dan juga karena peserta yang diundang sesuai dengan nama pemegang hak milik atas tanah yang terkena pembebasan</p> <p>Beberapa alasan penyebab adanya isu/kesenjangan secara internal sbb:</p> <p>Belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) atas kesetaraan gender dalam sub output sosialisasi/penyuluhan sehingga pemrakarsa tidak dapat menentukan kuota jumlah undangan perempuan dan laki-laki yang dapat mengikuti kegiatan sosialisasi/ penyuluhan karena terkait dengan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa peserta sosialisasi/penyuluhan harus pemegang hak atas tanah tersebut, atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa dimana 1 orang hanya dapat menerima kuasa dari 1 pemilik hak.</p>

	<p>Beberapa alasan penyebab adanya isu/kesenjangan secara Eksternal sbb: Adanya asumsi bahwa suara laki-laki selaku kepala keluarga sudah mewakili suara perempuan selaku istri maupun anggota keluarga yang lain. Sehingga perempuan/istri dianggap tidak perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga mereka tidak mengetahui informasi rinci terkait rencana pembebasan lahan yang terkena rencana trase jalan tol; tidak dapat ikut menentukan nilai Uang Ganti Rugi tanah; dan Uang Ganti Rugi tanah tersebut terkadang tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan aspirasi istri/anggota keluarga yang lain.</p> <p>Isu/kesenjangan yang dapat disimpulkan sbb :</p> <p>Akses: Kurangnya informasi bagi kelompok perempuan dan anak2 dalam hal akan diadakannya kegiatan pembebasan Tanah</p> <p>Partisipasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya peluang/kesempatan bagi kelompok perempuan utk ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan. 2. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam hal pengambilan keputusan untuk areal yang akan dibebaskan serta keputusan penetapan harga ganti rugi. <p>Manfaat :</p> <p>Kegiatan pembebasan tanah pada umumnya kurang dirasakan manfaatnya bagi kelompok perempuan</p> <p>Karena banyak kelompok laki2/kaum bapak sebagai kepala keluarga yang tidak memberikan info tentang besaran ganti rugi yang diperoleh bahkan dipakai untuk kepentingannya sendiri (misalkan kawin lagi)</p>	
Rencana Aksi	Sub Ouput	<p>Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Prov. Sumatera Utara; 2. Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Prov. Jawa Barat; 3. Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Prov. Jawa Tengah; 4. Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Prov. Jawa Timur.

	Tujuan	Tersedianya tanah untuk jalan bebas hambatan / jalan tol dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak pembebasan tanah baik kelompok laki-laki maupun perempuan	
		Komponen 1	Menyusun Petunjuk teknis utk sosialisasi/penyuluhan kegiatan Pembebasan tanah dengan mempertimbangkan kesetaraan /keadilan bagi laki dan perempuan dari tingkat persiapan s/d pelaksanaan
		Komponen 2	Melaksanakan kegiatan pembebasan Tanah dari tahap persiapan s/d pelaksanaandengan melibatkanmasyarakat secara adil/merata baik kelompok laki2 maupun perempuan
		Anggaran Suboutput	Rp 966.575.860.000,-
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 1.006.621.178.000,-		
Indikator Outcome (dampak/hasil)	Terwujudnya peningkatan peran/keterlibatan kelompok perempuan dalam kegiatan pembebasan tanah dari tahap persiapan s/d pelaksanaan		

Tabel L.10. Contoh GAP Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Tahun Anggaran 2012

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	GENDER		Kebijakan dan Rencana Ke Depan	Rencana Aksi	Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Eksternal	Sebab Kesenjangan Internal			Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p>Program: Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</p> <p>Kegiatan : Pembinaan, Pemeliharaan, pengawasan dan Pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Jumlah Desa yang terlayani Infrastruktur Air minum</p> <p>Output Kegiatan : SPAM PERDESAAN melalui Pelaksanaan Pamimas di 507 desa</p> <p>Sub Output: Pamimas</p> <p>Tujuan: Meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota yang mendapat akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang sehat dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat</p>	<p>Kelembagaan masyarakat merupakan permasalahan yang sudah menjadi isu nasional dengan ditandatanganinya dokumen MDG's. Guna mencapai tujuan tersebut, maka perlu suatu upaya guna menjamin keberlanjutan sarana yang akan dibangun. Salah satunya melalui program RAMSIMAS yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RAMSIMAS telah dilaksanakan sejak TA 2008. Sarana AMPL di beberapa desa telah terbangun dan dimanfaatkan warga desa sasaran. Pemanfaatan air minum/bersih lebih dekat dengan kaum perempuan (ibu rumah tangga) dari pada kaum laki-laki. Perempuan/ibu-ibu lebih sering menggunakan air untuk masak, mencuci, merawat & memandikan bayi, dll. Sehingga perlu keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sarana AMPL. 2. Tim Fasilitator harus mampu mendorong kaum perempuan untuk maju dalam pemberdayaan Badan Pengelola SWM Desa. Guna menjamin keberlanjutan sarana yang terbangun dan memperkuat potensi pengembangannya, maka diperlukan perhatian terhadap unsur Badan Pengelola SWM Desa. <p>Kegiatan Pemimas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator Hibah Insentif desa dalam program Pamimas 2. Pelatihan BP-SPAMS <p>Kedua kegiatan tsb secara umum (tb) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan desa/kecamatan, dilakukan sosialisasi, melibatkan 30,67% perempuan, 70,33% laki-laki. 2. Dalam pertemuan lokasi sasaran program keterlibatan perempuan hanya sebagai pengisi/konsep tsb tsb terlibat dlm pengambilan keputusan. Baik L maupun P cenderung mengkait apa yang telah dipaparkan oleh kaum laki-laki. 3. Partisipasi dlm identifikasi masalah dan analisis situasi P (34,21%) dan L (65,79%) 4. Partisipasi dlm kegiatan pemimas, perempuan (86,72%) dan laki2 (13,28%) 	<p>Akses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses informasi, kepada kelompok sasaran program terutama perempuan 2. Masih Surangnya Pemahaman dari sisi kelompok perempuan tentang pentingnya keterlibatan dalam pelaksanaan identifikasi masalah di lingkungannya, cukup merasa tamak oleh laki-laki <p>Partisipasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi perempuan secara nominal 30% sdh tercapai, namun hanya diikuti oleh kelompok tertentu yang tak sesuai dengan sasaran program. 2. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan lokasi sasaran program hanya terbatas, usulan tsb pengambilan keputusan 3. Partisipasi perempuan dalam kelembagaan kurang. Karena pada umumnya perempuan cenderung tidak percaya diri dan menganggap bahwa itu dlm kelembagaan adalah urusan laki-laki. <p>Kontrol: Kelompok perempuan relatif masih sedikit dalam melakukan kontrol dalam operasional dan pemeliharaan Pamimas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum/kurangnya pemahaman yang berperspektif Gender di lingkungan Dit.Jem Cipta Karya , Pemda Propinsi/kabupaten/kota dan seluruh Pemangku kepentingan yang terkait. 2. Kurangnya informasi dan sosialisasi secara merata bagi laki-laki maupun perempuan tentang cara2 hidup sehat, pentingnya tanggapa akan kondisi lingkungan serta bertanggung jawab untuk mengelola sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok perempuan pada umumnya tidak peduli akan masalah lingkungan untuk cara hidup bersih dan sehat , padahal kelompok perempuan merupakan pengguna dan pengelola utama air terkait dgo keperluan Rumah tangga dan sarana sanitasi di masyarakat. 2. Kelompok perempuan pada umumnya mempunyai persepsi tidak perlu tahu tentang prasarana dan sarana air minum dan sanitasi karena dianggap sebagai kegiatan/ususan laki-laki dan perempuan menganggap bahwa bidang usahanya adalah kegiatan domestik/Rumah Tangga 3. Kelompok perempuan lebih banyak waktu dan tenaga utk kegiatan Rumah Tangga sehingga kesempatan sangat sedikit dlm kegiatan mengontrol dan memelihara sarana dan prasarana Air minum dan sanitasi 4. Budaya patriarchy yang menyebabkan kelompok perempuan tidak mempunyai rasa percaya diri dalam menyampaikan aspirasinya serta dlm pengambilan keputusan. 	<p>Meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota yang mendapat akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang sehat (improved) dan praktik perilaku hidup bersih dan yang responsif gender.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan fasilitator Hibah Insentif Desa: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi/advokasi tentang Gender bagi pelaku dan pelaksana program b. Pendampingan Pelatihan BP-SPAMS dan Kader: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi /Advokasi tentang Gender bagi masyarakat • Menyusun tata cara pendekatan bagi kelompok perempuan agar memiliki rasa percaya diri dan mau berpartisipasi dlm perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarpras air minum dan sanitasi. 2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM): Kegiatan Pembangunan fisik dan monitoring dan Evaluasi. (Memberikan peluang/kesempatan bagi kelompok perempuan untuk lebih ikut berperan secara aktif dalam Badan Pengelola SPAMS di lokasi terkait. 	<p>Partisipasi kelompok perempuan dalam hal menyampaikan aspirasi dan berperan aktif dari tahap perencanaan s/d money/pemeliharaan minimal 30%.</p>	<p>Outcome/Dampak/Hasil output Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pemahaman yang merata tentang aspek gender di lingkungan Dit.Jem Cipta Karya, pemda propinsi/kabupaten/kota dan seluruh Pemangku Kepentingan serta masyarakat yang terkait. 2. Terwujudnya peningkatan partisipasi (>30%) dlm menyampaikan aspirasi dan berperan aktif bagi kelompok perempuan dari tahap perencanaan s/d money/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Gender Budget Statement
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Kementerian PU
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Cipta Karya
 Unit Eselon II/ Satker : Direktorat Pengembangan Air Minum/Pembinaan Pamsimas

Program	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Kegiatan	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum
Output Kegiatan	SPAM PERDESAAN melalui Pelaksanaan Pamsimas di 507 Desa
Analisis Situasi	<p>Pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat merupakan permasalahan yang sudah menjadi isu nasional dengan ditandatanganinya dokumen MDG's. Guna mencapai tujuan tersebut, maka perlu suatu upaya guna menjamin keberlanjutan sarana yang akan dibangun. Salah satunya melalui program PAMSIMAS yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi di bawah ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAMSIMAS telah dilaksanakan sejak TA 2008. Sarana AMPL di beberapa desa telah terbangun dan dimanfaatkan warga desa sasaran. Pemanfaatan air minum/bersih lebih dekat dengan kaum perempuan (ibu rumah tangga) dari pada kaum laki-laki. Perempuan/ibu-ibu lebih sering menggunakan air untuk memasak, mencuci, merawat & memandikan bayi, dll. Sehingga perlu keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sarana AMPL. Tim Fasilitator harus mampu mendorong kaum perempuan untuk maju dalam pembentukan Badan Pengelola SPAM Desa. Guna menjamin keberlanjutan sarana yang terbangun dan memperkuat potensi pengembangannya, maka diperlukan penguatan terhadap unsur Badan Pengelola SPAM Desa.

	<p>Kegiatan Pamsimas melingkupi ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator Hibah Insentif desa dalam program Pamsimas 2. Pelatihan BPSPAMS <p>Kedua kegiatan tersebut secara umum dapat digambarkan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemilihan desa/kelurahan dilakukan sosialisasi dgn melibatkan 30,67% perempuan dan 70,33% Laki2. 2. Dalam penentuan lokasi sasaran program keterlibatan perempuan hanya sebatas mengusulkan tetapi tdk terlibat dlm pengambilan keputusan. Baik Laki2 maupun Perempuan cenderung mengikuti apa yang telah disepakati oleh kaum laki2. 3. Pelibatan dlm identifikasi masalah dan analisa situasi P(34,21%) dan L (65,79%) 4. Pelibatan dalam kegiatan pemecuan, perempuan (86,72%) dan laki2 (13,28%) <p>Beberapa alasan penyebab adanya isu/kesenjangan secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum/kurangnya pemahaman yang berperspektif Gender di lingkungan Dit. Jen Cipta Karya, Pemda Propinsi/kabupaten/kota dan seluruh Pemangku kepentingan yang terkait. 2. Kurangnya informasi dan sosialisasi secara merata bagi laki-laki maupun perempuan tentang cara2 hidup sehat, pentingnya tanggap akan kondisi lingkungan serta bertanggung jawab untuk mengelola sarana dan prasarana air minum dan sanitasi <p>Beberapa alasan penyebab adanya isu/kesenjangan secara eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok perempuan pada umumnya tidak peduli akan masalah lingkungan untuk cara hidup bersih dan sehat , padahal kelompok perempuan merupakan pengguna dan pengelola utama air terkait dgn keperluan Rumah tangga dan sarana sanitasi di masyarakat. 2. Kelompok perempuan mempunyai persepsi tidak perlu tahu tentang prasarana dan sarana air minum dan sanitasi karena dianggap sebagai kegiatan/urusan laki-laki, dan menganggap bahwa bidang urusannya adalah kegiatan domestik/rumah tangga
--	--

	<p>3. Kelompok perempuan lebih banyak waktu dan tenaga utk kegiatan Rumah Tangga sehingga kesempatan sangat sedikit dlm kegiatan mengontrol dan memelihara sarana dan prasarana Air minum dan sanitasi</p> <p>4. Budaya patriarki yang menyebabkan kelompok perempuan tidak mempunyai rasa percaya diri dalam menyampaikan aspirasinya serta dlm pengambilan keputusan.</p> <p>Isu/kenjangan yang dapat disimpulkan sbb: Akses :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses informasi kepada kelompok sasaran program terutama perempuan 2. Masih kurangnya Pemahaman dari sisi kelompok perempuan tentang pentingnya keterlibatan dalam pelaksanaan identifikasi masalah di lingkungannya, cukup merasa terakili oleh laki-laki <p>Partisipasi ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi perempuan secara nominal 30% sdh terpenuhi, namun hanya diikuti oleh kelompok tertentu yang tdk sesuai dengan sasaran program. 2. Keterlibatan perempuan dalam penentuan lokasi sasaran program hanya terbatas usulan tdk pengambilan keputusan. 3. Partisipasi perempuan dalam Kelembagaan kurang karena pada umumnya perempuan cenderung tidak percaya diri dan menganggap bahwa ikut dlm kelembagaan adalah urusan Laki-laki. <p>Kontrol :</p> <p>Kelompok perempuan relatif masih sedikit dalam melakukan kontrol dalam operasional dan pemeliharaan Pamsimas</p>	
Rencana Aksi	Sub output	<i>PAMSIMAS</i>
	Tujuan Sub Output	Meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang mendapat akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang sehat (improved) dan praktek perilaku hidup bersih dan sehat dan yang responsif gender.

		Komponen 1	<p>1. Pembangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan fasilitator Hibah Insentif Desa: Sosialisasi/advo kasi tentang Gender bagi pelaku dan pelaksana program 2. Pendampingan Pelatihan BP-SPAMS dan Kader : <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi /Advo kasi tentang Gender bagi masyarakat • Menyusun tata cara pendekatan bagi kelompok perempuan agar memiliki rasa percaya diri dan mau berpartisipasi dlm perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarpras air minum dan sanitasi.
		Komponen 2	<p>Bantuan Langsung Masyarakat (BLM): Kegiatan Pembangunan fisik dan monitoring dan Evaluasi. (Memberikan peluang/kesempatan bagi kelompok perempuan untuk ikut lebih berperan secara aktif dalam Badan Pengelolaan SPAMS di masing2 lokasi terkait)</p>
	Anggaran Sub Output	Rp. 153.182.920.000	
Anggaran Output Kegiatan	Rp. 153.182.920.000		
Indikator Outcome (dampak/hasil)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pemahaman yang merata tentang aspek gender di Lingkungan Dit.Jen Cipta Karya, pemda propinsi/Kabupaten/Kota dan seluruh Pemangku Kepentingan serta masyarakat yang terkait. 2. Terwujudnya peningkatan partisipasi (>30%) dlm menyampaikan aspirasi dan berperan aktif bagi kelompok perempuan dari tahap perencanaan s/d monev/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. 		

Tabel L.11. Contoh GAP Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Ditjen Penataan Ruang Tahun Anggaran 2012

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Isu	Kebijakan dan Rencana Ke Depan	Rencana Aksi	Pengukuran Hasil	
				Gender			Reformulasi Tujuan	Data Dasar (Base-line)
<p>Program : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Kegiatan : Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang</p> <p>Indikator Kinerja kegiatan: Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>Output : Penyiapan dan Pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan Dunia Usaha</p> <p>Tujuan : Menyiapkan dan Melaksanakan kerjasama Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha.</p>	<p>Penyelenggaraan Penataan Ruang di dalam tahap perencanaan s/d pelaksanaannya memerlukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat Pada umumnya masyarakat terutama generasi muda belum memahami pentingnya peran Penataan ruang dalam rangka untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Begitu pula belum dilibatkannya masyarakat generasi muda secara optimal dalam proses penyusunan RTR.</p>	<p>Akses : Masyarakat terutama generasi muda kurang memahami pentingnya peran tata ruang disebabkan karena kurang/terbatasnya informasi tentang program penyelenggaraan penataan ruang.</p> <p>Partisipasi : Masyarakat terutama generasi muda belum mendapatkan peluang/kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya dalam program penataan ruang.</p> <p>Kontrol : Masyarakat terutama generasi muda belum melakukan kontrol/pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama generasi muda sebagai pengguna/ pemanfaat ruang.</p> <p>2. Lemahnya kelembagaan Penataan Ruang di daerah serta belum optimalnya penggunaan RTRW sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di daerah, serta penyusunan RTRW tidak dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat.</p> <p>3. pemerintah/pemda kurang menyadari bahwa generasi muda merupakan potensi untuk berkontribusi dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang.</p>	<p>1. Adanya anggapan bahwa rencana, pengendalian dan pemanfaatan ruang adalah tanggungjawab pemerintah /pemda.</p> <p>2. Masyarakat termasuk generasi muda kurang menyadari sebagai pengguna/pe manfaat dan pengendali pemanfaatan ruang.</p>	<p>Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama Kemitraan dengan masyarakat terutama generasi muda (Siswa/siswi, SMA/SLTA) dan Dunia Usaha yang responsif gender.</p>	<p>1. Fasilitasi: Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dalam implementasi RTRW di Kabupaten dan kota percontohan.</p> <p>2. Pembinaan/P emberdayaan;</p> <p>a. Pembentuk an Kader Generasi Muda Pelopor Penataan Ruang.</p> <p>b. Fasilitasi Perwujudan Inisiatif Kader Pelopor Penataan Ruang. (Pelatihan)</p>	<p>1. Untuk kategori Kader: Pengenalan Tata Ruang bagi 1750 anak didik Siswa/Siswi di Jabodetabek dari 35 sekolah (masing-masing 40 -50 Siswa/i) Dan 500 anak didik per propinsi yang tersebar dari 32 propinsi (masing-masing propinsi 15 sekolah)</p> <p>2. Untuk Kategori Pelopor di targetkan 70 Siswa/i.</p> <p>3. Pemberian Penghargaan di Desa Wisata TMII JKT pada Hari Tata Ruang kepada 300 Siswa/i terpilih dari Kader dan Pelopor yang berasal dari 33 propinsi.</p>	<p>1. Terwujudnya Peningkatan kesadaran, keinginan dan kemampuan masyarakat terutama generasi muda /Pelajar SLTA untuk lebih berperan aktif sebagai Mitra Kerja Pemerintah/Pemda dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.</p> <p>2. Tersedianya Generasi Muda Siswa/i yang dapat menjadi Katalisator terhadap Program-program pemerintah di bidang penataan Ruang, untuk dapat memasyarakatkan dan mampu menciptakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Penataan ruang di wilayahnya masing2.</p>

Gender Budget Statement
(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pekerjaan Umum
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Penataan Ruang
 Unit Eselon II/ Satker : Direktorat Bina Program dan Kemitraan

Program	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang
Indikator Kinerja Kegiatan	Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha
Output Kegiatan	Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha
Analisa Situasi	<p>Penyelenggaraan Penataan Ruang di dalam tahap perencanaan s/d pelaksanaannya memerlukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat. Pada umumnya masyarakat terutama generasi muda belum memahami pentingnya peran Penataan Ruang dalam rangka untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Begitu pula belum dilibatkannya masyarakat generasi muda secara optimal dalam proses penyusunan RTR.</p> <p>Beberapa alasan penyebab adanya isu/kesenjangan secara internal, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama generasi muda sebagai pengguna/ pemanfaat ruang. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama generasi muda sebagai pengguna/ pemanfaat ruang. 2. Lemahnya kelembagaan Penataan Ruang di daerah serta belum optimalnya penggunaan RTRW sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di daerah, serta penyusunan RTRW tidak dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat. 3. pemerintah/pemda kurang menyadari bahwa generasi muda merupakan potensi untuk berkontribusi dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang.

	<p>Beberapa alasan penyebab adanya isu/kesenjangan secara eksternal, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya anggapan bahwa rencana , pengendalian dan pemanfaatan ruang adalah tanggungjawab pemerintah /pemda. 2. Masyarakat termasuk generasi muda kurang menyadari sebagai pengguna/pemanfaat dan pengendali pemanfaatan ruang. <p>Isu/kesenjangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>Akses : Masyarakat terutama generasi muda kurang memahami pentingnya peran tata ruang disebabkan karena kurang/terbatasnya informasi tentang program penyelenggaraan penataan ruang.</p> <p>Partisipasi : Masyarakat terutama generasi muda belum mendapatkan peluang/kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya dalam program penataan ruang.</p> <p>Kontrol : Masyarakat terutama generasi muda belum /kurang terlibat dalam melakukan kontrol/pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Fasilitasi
	Sub Komponen 1.1	Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dalam Implementasi RTRW di Kabupaten dan Kota Percontohan
	Anggaran Sub Komponen 1.1	Rp 1.250.000.000
	Komponen 2	Pembinaan/Pemberdayaan
	Sub Komponen 2.1	Pembentukan Kader Generasi Muda Pelopor Penataan Ruang
	Anggaran Sub Komponen 2.1	1.000.000.000

	Sub komponen 2.2	Fasilitasi Perwujudan Inisiatif Kader Pelopor Penataan Ruang
	Anggaran Sub Komponen 2.2	800.000.000
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 4.650.000.000	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	<p>1. Terwujudnya Peningkatan kesadaran, keinginan, dan kemampuan masyarakat terutama generasi muda /Pelajar SL TA untuk lebih berperan aktif sebagai Mitra Kerja Pemerintah/Pemda dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.</p> <p>2. Tersedianya generasi muda Siswa/i yang dapat menjadi Katalisator terhadap Program-program pemerintah di bidang penataan Ruang, untuk dapat memasyarakatkan dan mampu menciptakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Penataan ruang di wilayahnya masing-masing.</p>	

A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,



Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP
NIP. 110023320



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110